



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN,
TEKNOLOGI INFORMASI,
DAN PARIWISATA

2025



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-Statistics Indonesia

LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN,
TEKNOLOGI INFORMASI,
DAN PARIWISATA



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-Statistics Indonesia



Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga tahun 2025 bisa dilalui dengan baik. Demikian juga Laporan Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025 terselesaikan tepat waktu.

Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dinamika bagi direktorat. Dengan semangat kerja, ikhtiar, doa, dan kerjasama jajaran pimpinan dan keluarga besar BPS, maka penyelesaian tugas Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata dapat dilakukan dengan sinergi yang baik.

Seluruh laporan kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja direktorat dan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja di lingkungan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. Semoga pencapaian kinerja tahun 2025 ini dapat mendorong perbaikan kinerja di unit Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata di masa yang akan datang.

Jakarta, 19 Januari 2026
Direktur Statistik Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata

Harmawanti Marhaeni



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran.....	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja	4
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	5
1.4 Potensi dan Permasalahan.....	9
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	12
Bab II Perencanaan Kinerja.....	15
2.1 Visi dan Misi BPS	17
2.2 Target Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata 2025-2029	22
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025	23
2.4 Dukungan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	24
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	29
3.1 Realisasi, Capaian Kinerja dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	31
3.2 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Terhadap Target Renstra 2025-2029.....	47
3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 50	
3.4 Prestasi dan Inovasi	56
3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025	59



Bab IV Kesimpulann	63
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja	66



DAFTAR TABEL

22	TABEL 1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata 2025
24	TABEL 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025
26	TABEL 3. Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025
31	TABEL 4. Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025
35	TABEL 5. Capaian Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) 2025
37	TABEL 6. Sasaran Kegiatan, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja 2023-2025
39	TABEL 7. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025
44	TABEL 8. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025
48	TABEL 9. Sasaran Program, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja 2025 dan 2029
59	TABEL 10. Sasaran Strategis, Target, Realisasi, Capaian Kinerja, Pagu, Realisasi Anggaran, Persentase Realisasi Anggaran, dan Efisiensi 2025



DAFTAR GAMBAR

xiii	GAMBAR 1. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025
xiv	GAMBAR 2. Realisasi Anggaran Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025
5	GAMBAR 3. Susunan Organisasi Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025
6	GAMBAR 4. Persentase Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025
7	GAMBAR 5. Persentase Pegawai Menurut Generasi Tahun 2025
7	GAMBAR 6. Persentase Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025
8	GAMBAR 7. Persentase Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025
33	GAMBAR 8. Perkembangan Capaian Kinerja Total Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata 2023- 2025
34	GAMBAR 9. Predikat PKO Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi
34	GAMBAR 10. Interpretasi Predikat PKO



36

GAMBAR 11.

Capaian Kinerja Direktorat dan Rata-rata Eselon II Kedepujian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

51

GAMBAR 12.

Tema Pembangunan RKP Tahun 2025



DAFTAR LAMPIRAN

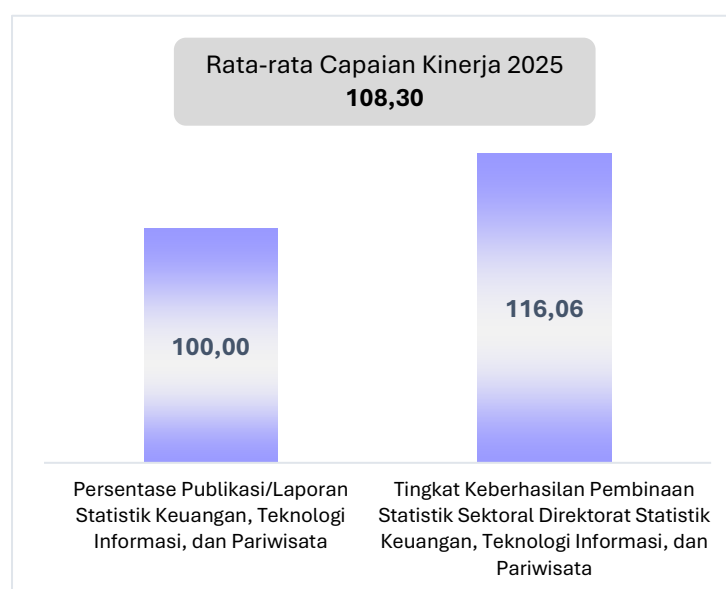
69	LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
71	LAMPIRAN 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 Manusia
72	LAMPIRAN 3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025
73	LAMPIRAN 4. Jumlah Pegawai Fungsional BPS Tahun 2025
74	LAMPIRAN 5. Daftar Publikasi Berkualitas Tahun 2025
76	LAMPIRAN 6. Surat Hasil Evaluasi TPSS (SS)
77	LAMPIRAN 7. Surat Hasil Penilaian SAKIP
78	LAMPIRAN 8. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja BPS TA 2025
79	LAMPIRAN 9. Inovasi dan Prestasi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, termasuk pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2025. Laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi dan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik selama lima tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2025-2029.



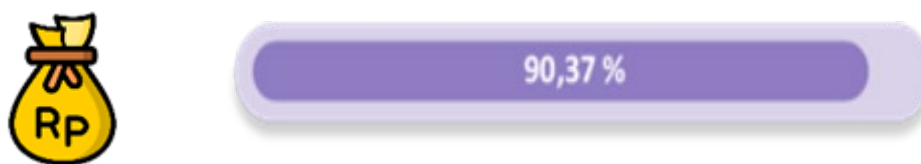
Gambar 1. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata memiliki dua sasaran strategis dengan dua indikator kinerja. Kedua indikator kinerja tersebut telah



mencapai target yang ditetapkan, bahkan melebihi target seperti yang ditampilkan pada Gambar 1 di atas. Secara keseluruhan, capaian kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2025 adalah sebesar 108,03 persen. Jika dilihat berdasarkan Penilaian Kerja Organisasi (PKO), Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, mendapatkan predikat Baik dengan Nilai Kerja Organisasi (NKO) rata-rata capaian Penilaian Kerja sebesar 94,5 persen.

Pencapaian kinerja sasaran Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menggunakan sumber daya anggaran sebesar 643,18 juta rupiah atau 90,37 persen dari alokasi anggaran sebesar 711,68 juta rupiah. Penyerapan anggaran tahun 2025 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebesar 90,37 persen sudah diatas target Kementerian Keuangan sebesar 90 Persen. Namun Realisasi kinerja anggaran tahun 2025 lebih rendah 8,22 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 98,59 persen.

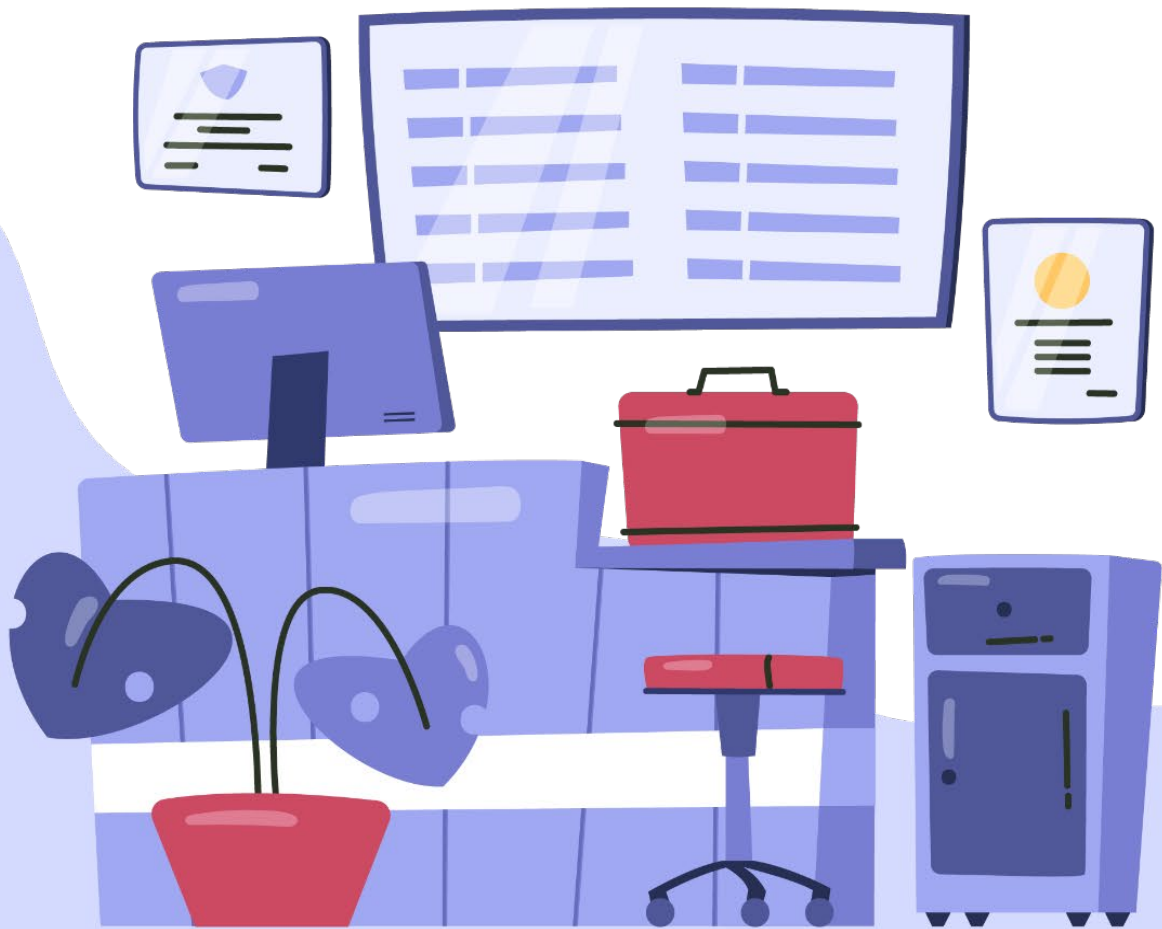


Gambar 2. Realisasi Anggaran Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2025 telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 9,63 persen. Hal ini dilakukan dengan upaya optimalisasi penyerapan anggaran yang disertai penggunaan anggaran secara efektif dan akuntabel. Upaya optimalisasi dilakukan dengan mengalihkan kegiatan monitoring pelaksanaan melalui portal kolaborasi. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka dialihkan menjadi secara daring melalui media *zoom meeting*, *google meet*, *microsoft teams*, dan sejenisnya. Selain itu, dilakukan alih teknologi pada proses pengumpulan data survei, yang semula menggunakan kuesioner kertas/*Paper Assisted Personal Interviewing* (PAPI) menjadi kuesioner berbasis android melalui *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI). Teknik CAPI ini mempercepat entri data, meningkatkan akurasi, dan memungkinkan validasi langsung. Optimalisasi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi output kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.



Laporan Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja serta strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga yang berwenang menyelenggarakan statistik dasar, mengoordinasikan statistik sektoral dan khusus, serta menjamin keterpaduan data nasional dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, BPS menyelenggarakan kegiatan perstatistikan yang direncanakan secara lima tahunan dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS serta para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik, dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama periode tersebut.

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata selaku Unit Kerja Eselon II pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagai pengguna anggaran negara, setiap tahun wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan komponen keempat dari Sistem AKIP, yaitu Pelaporan Kinerja. Laporan kinerja 2025 ini disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005;
5. PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja selama tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai kesimpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada periode berikutnya.

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan mewujudkan organisasi Badan Pusat Statistik yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, pada tanggal 22 Desember 2020 telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Peraturan tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor B/1501/M.K.T.01/2020.

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik tersebut, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata merupakan salah satu unit Eselon II di lingkungan Kedepuyan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa serta bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Adapun tugas utama Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Melaksanakan penyelenggaraan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata

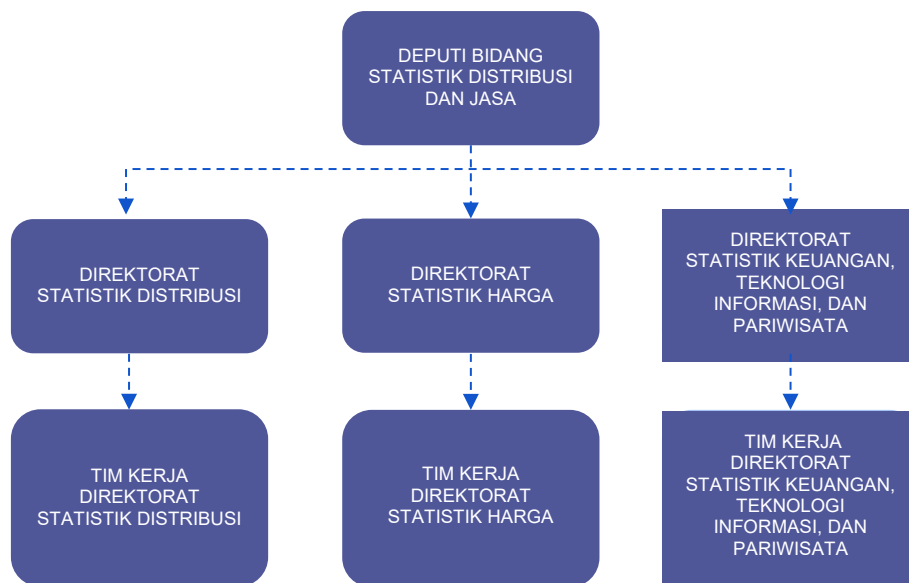
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menyelenggarakan:

- Penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik keuangan;



- Penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik komunikasi dan teknologi informasi; dan
- Penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pariwisata.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata bertanggungjawab kepada Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, dan akan dibantu oleh beberapa tim kerja. Tim kerja merupakan kelompok pejabat fungsional, serta bertugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing tim kerja. Penetapan tim kerja ditentukan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, struktur organisasi Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Susunan Organisasi Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

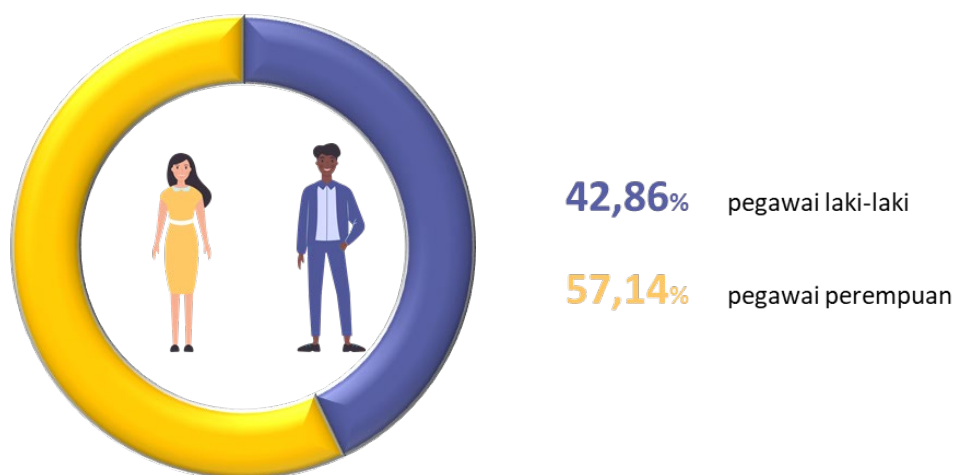
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Sumber daya manusia (SDM), yang dalam konteks pemerintahan dikenal sebagai sumber daya aparatur, merupakan unsur strategis dalam penyelenggaraan manajemen organisasi pemerintahan. Sumber daya aparatur berperan penting dalam menggerakkan organisasi serta menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,



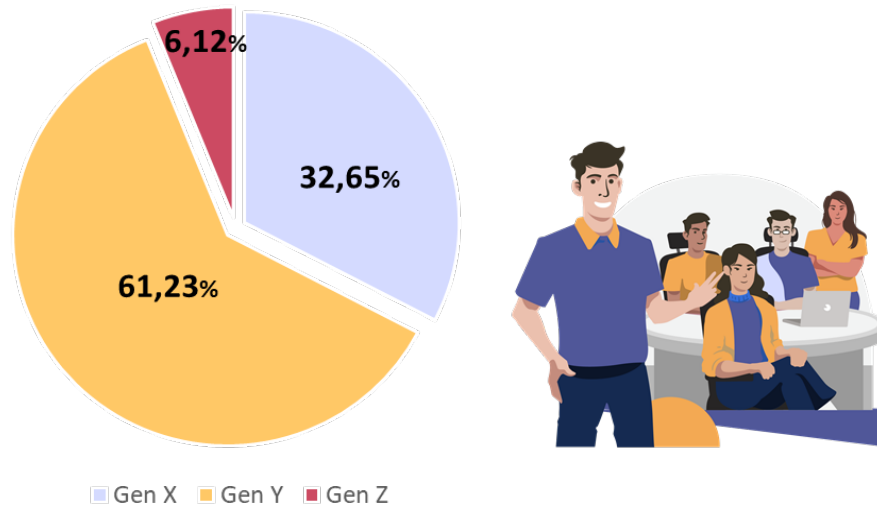
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), organisasi pemerintahan perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata dipimpin oleh Ibu Harmawanti Marhaeni dan didukung oleh 48 orang pegawai, sehingga jumlah pegawai di Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tercatat sebanyak 49 orang (per 31 Desember 2025). Komposisi pegawai tersebut terdiri atas 21 orang pegawai laki-laki (42,86 persen) dan 28 orang pegawai perempuan (57,14 persen), sebagaimana disajikan pada Gambar 4.



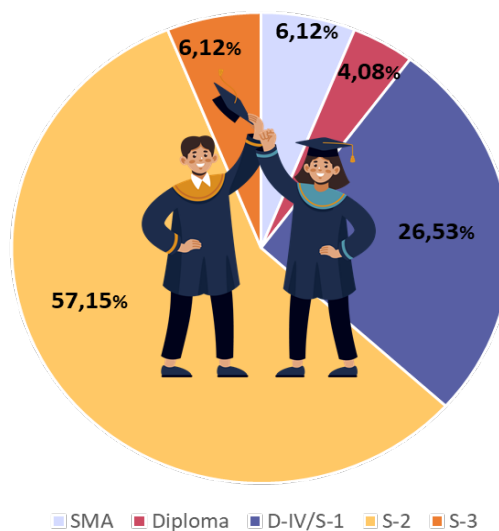
Gambar 4. Persentase Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

Berdasarkan klasifikasi kelompok usia, komposisi pegawai Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata didominasi oleh Generasi Y (Generasi Milenial) sebanyak 30 orang (61,23 persen), diikuti oleh Generasi X sebanyak 16 orang (32,65 persen), serta Generasi Z sebanyak 3 orang (6,12 persen). Keberadaan aparatur dari Generasi Milenial dan Generasi Z diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas guna mendukung transformasi digital serta penguatan penyelenggaraan statistik di era revolusi industri digital.



Gambar 5. Persentase Pegawai Menurut Generasi Tahun 2025

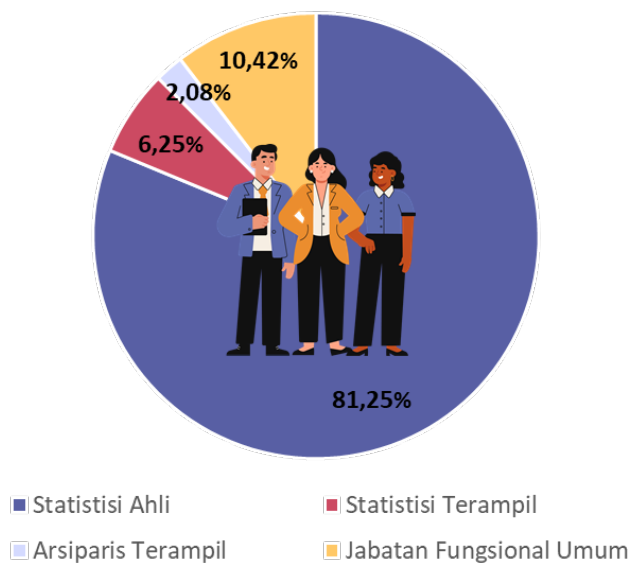
Salah satu cerminan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Pada Tahun 2025, SDM Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menunjukkan kualifikasi pendidikan yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal tersebut tercermin dari komposisi pegawai yang terdiri atas 3 orang berpendidikan setingkat SLTA, 2 orang Diploma, 13 orang berpendidikan D-IV/S-1, 28 orang berpendidikan S-2, dan 3 orang berpendidikan S-3, sebagaimana disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Persentase Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata secara berkelanjutan melakukan upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan lanjutan. Pada Tahun 2025, tercatat sebanyak dua orang pegawai Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang sedang mengikuti pendidikan melalui jalur tugas belajar, yang terdiri atas satu orang pada jenjang S-2 dan satu orang pada jenjang S-3.



Gambar 7. Persentase Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai pemerintah dituntut untuk memiliki keahlian tertentu yang tercermin dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Dari total 48 pegawai Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, sebanyak 39 pegawai (81,25 persen) menduduki JFT Statistisi Ahli, 3 pegawai (6,25 persen) JFT Statistisi Terampil, 1 pegawai (2,08 persen) JFT Arsiparis Terampil, serta 5 pegawai (10,42 persen) masih berada pada jabatan fungsional umum, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7. Dibandingkan dengan Tahun 2024, terjadi sedikit perubahan komposisi pegawai, yaitu adanya penambahan dua pegawai fungsional umum yang merupakan pegawai yang sedang menempuh tugas belajar jenjang S-2 dan pegawai baru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sementara itu, pada Tahun 2025 terdapat dua pegawai yang keluar karena memasuki masa pensiun.



Sementara pencapaian kinerja sasaran Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menggunakan sumber daya anggaran sebesar 643,18 juta rupiah atau 90,37 persen dari alokasi anggaran sebesar 711,68 juta rupiah (setelah *self-blocking*) dan 15,07 persen dari alokasi anggaran sebesar 4,27 miliar rupiah (sebelum *self-blocking*). Penggunaan sumber daya anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun, pencapaian tersebut mengalami penurunan sebesar 8,22 persen (setelah *self-blocking*) atau 83,12 persen (sebelum *self-blocking*) dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 98,59 persen. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menjelang akhir tahun.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Sebagai dampak dari kebijakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi guna mewujudkan organisasi yang lebih efektif dan efisien melalui penghapusan jabatan eselon III dan IV, diperlukan adaptasi kembali dalam pola kerja pegawai. Pegawai dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja tim yang lebih fleksibel, tidak terbatas pada subpekerjaan yang selama ini ditangani, tetapi juga berorientasi pada dukungan terhadap subpekerjaan lain demi pencapaian kinerja tim secara optimal. Tantangan lainnya adalah perlunya koordinasi yang cepat dan efektif antar personel tim dalam mengatasi pekerjaan yang berpotensi menjadi hambatan. Selain itu, tantangan di lingkungan kerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata semakin meningkat seiring dengan perannya yang strategis dalam penyediaan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan selama tahun 2025, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata telah melaksanakan sejumlah upaya, antara lain melalui penyelenggaraan rapat koordinasi secara *hybrid*, baik daring maupun luring. Pembahasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara kolaboratif melalui rapat interaktif dengan melibatkan bagian-bagian terkait sesuai dengan kebutuhan tim kerja. Selain itu, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata melakukan pengelolaan serta penjadwalan pekerjaan secara lebih terstruktur, yang salah satu hasilnya tercermin pada percepatan penerbitan publikasi dari jadwal yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pelaksanaan tugas



dan fungsi Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata secara lebih optimal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebagai satuan kerja Badan Pusat Statistik (BPS) didukung oleh perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang statistik. Landasan hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menjadi payung hukum bagi BPS dalam menyelenggarakan kegiatan statistik dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Kerangka regulasi ini menjadi kekuatan bagi BPS, khususnya Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, dalam mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kegiatan statistik secara berkelanjutan.

BPS memiliki 38 satuan kerja (satker) di level provinsi dan 514 satker di level kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan data kepada konsumen BPS, namun dapat juga menjadi permasalahan dalam menghasilkan kualitas data yang sama di seluruh satuan kerja (satker). Selain itu, ada beberapa hal lain yang dapat dipetakan sebagai potensi dan permasalahan BPS, khususnya di Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.

Beberapa potensi yang dimiliki Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata antara lain:

- 1) Kebutuhan dan kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata relatif cukup besar. Hal ini teridentifikasi melalui hasil kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2025. Jenis data yang paling banyak dicari konsumen dari Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata adalah Statistik Keuangan Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Lembaga Keuangan. Hal tersebut menjadi potensi yang menguntungkan bagi Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata untuk menghasilkan dan menyajikan data statistik yang berkualitas.



- 2) BPS memiliki posisi yang tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata mendukung BPS dalam menjalankan peran tersebut.
- 3) BPS didukung oleh aparatur sipil negara yang berkualitas yang tersebar di satker seluruh Indonesia. BPS melalui Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) menghasilkan SDM yang profesional di bidang statistik. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di BPS dan juga Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.
- 4) Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata telah menggunakan teknologi dan informasi yang *up to date* dalam mendukung pelaksanaan survei di lingkungan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, antara lain berupa penerapan *Paper and pencil Personal Interview (PAPI)*, *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)*, dan *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)*. Pengembangan metode statistik yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.
- 5) Kerjasama antara Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
- 6) Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata juga telah memanfaatkan sumber data baru yang sedang berkembang saat ini yaitu pemanfaatan data administrasi dan pemanfaatan *Big Data* berupa *Mobile Positioning Data (MPD)*. Hal tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengumpulan data.

Beberapa permasalahan yang muncul di Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, antara lain:

- 1) Publikasi Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang dihasilkan tidak semua dapat menampilkan nilai akurasi (*Relative Standard Error*), hanya survei dengan pendekatan *probability sampling* yang bisa menghasilkan nilai akurasi dengan berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.



- 2) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata saat ini dirasa masih belum cukup mendukung kegiatan yang ada. Keadaan tersebut berimbas pada kemampuan untuk mencapai target kinerja secara tepat waktu, sehingga ada pekerjaan yang harus dilakukan di luar jam kerja untuk memenuhi target penyelesaian publikasi.
- 3) Aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata untuk K/L/D/I masih mengalami permasalahan terutama kesulitan dalam menyamakan jadwal pembinaan dan kurang responsifnya K/L/D/I ketika akan dilakukan pembinaan sehingga berpengaruh terhadap nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dihasilkan.
- 4) Persentase *response rate* atau pemasukan dokumen suatu survei di Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata masih menjadi permasalahan khususnya pada survei perusahaan/usaha, responden ada yang tidak ditemukan saat pendataan.
- 5) *Respondent Burden* (keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS) merupakan kendala yang menjadi tantangan bagi Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.

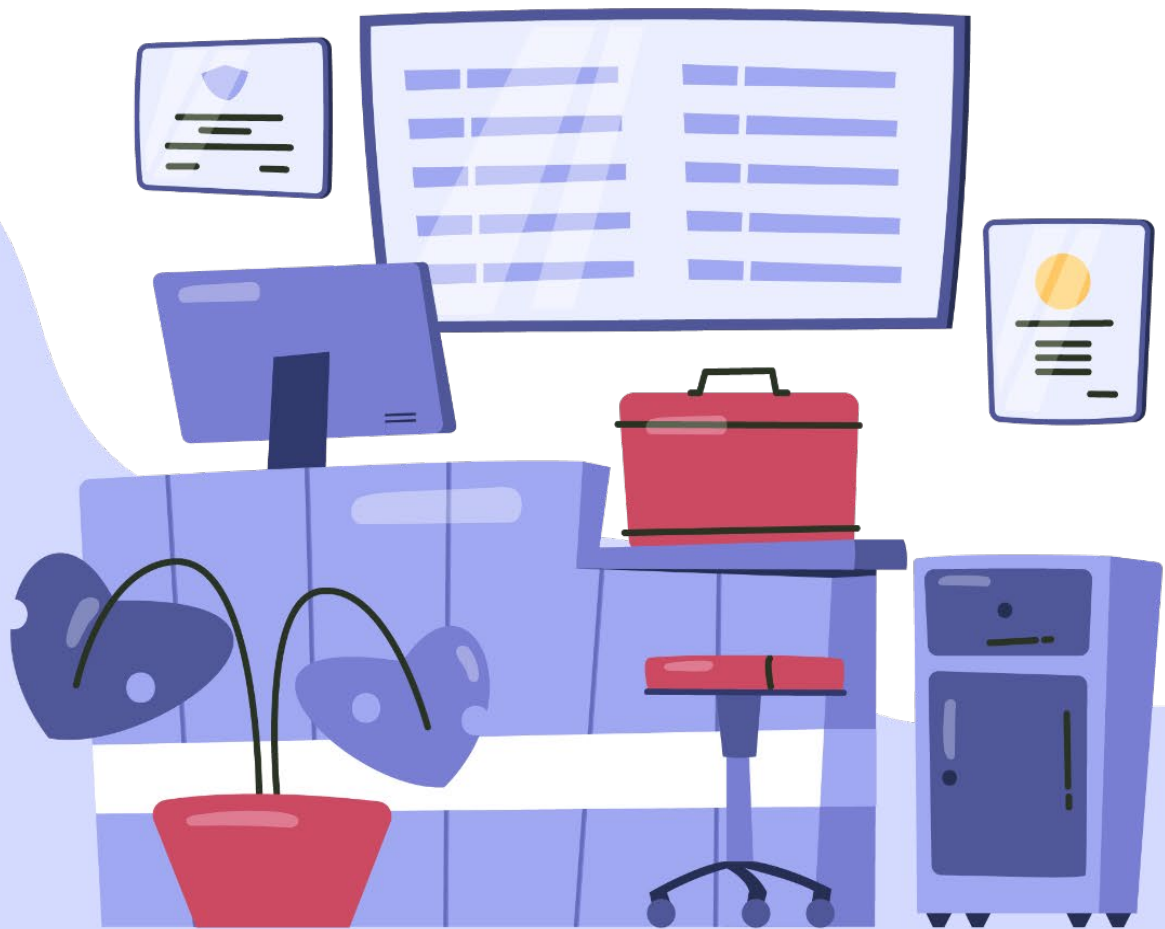
1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, sumber daya manusia, potensi serta permasalahan yang dihadapi organisasi.



- BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi visi, misi, sasaran strategis, rencana strategis Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata 2025- 2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, prestasi dan inovasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025.
- BAB IV Penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan atau rencana tindak lanjut di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan kinerja merupakan proses sistematis penetapan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja sebagai dasar pelaksanaan serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Perencanaan kinerja ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) sebagai arah kebijakan dan sasaran jangka menengah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

2.1 Visi dan Misi BPS

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis merupakan elemen penting dalam perencanaan strategis sebuah organisasi. Visi menggambarkan cita-cita jangka panjang (5 tahun) yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Strategis. Sementara itu, misi merupakan peran dan tugas utama yang harus dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi bersifat luas dan abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung. Tujuan adalah pernyataan yang lebih spesifik dari misi. Tujuan bersifat strategis dan menggambarkan fokus organisasi, namun masih belum memiliki ukuran dan indikator yang detail. Di sisi lain, sasaran strategis adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan.

Visi dan Misi BPS 2025–2029 disusun berdasarkan isu strategis kelembagaan yang memengaruhi peran BPS dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Perumusan ini selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*, beserta delapan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas.



“Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”



Dalam visi tersebut, BPS sebagai lembaga yang independen harus menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Independensi ini juga menggambarkan kemampuan BPS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang secara profesional, bebas dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi integritas, objektivitas, dan akurasi data yang dihasilkan.

Sebagai lembaga yang terpercaya, BPS harus menjaga kepercayaan publik sebagai penyedia statistik berkualitas tinggi yang dihasilkan dari metodologi yang transparan dan sesuai standar sehingga dapat menjadi rujukan statistik di tingkat nasional maupun internasional. Kepercayaan ini dibangun melalui independensi dan integritas dalam pengumpulan dan analisis, konsistensi dalam penyediaan data, serta komitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai undang-undang yang berlaku.

BPS sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini, BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan.

Untuk dapat mewujudkan Visi “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Badan Pusat Statistik merumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Misi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan *insight* yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang terpercaya dan berperan



aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Misi 2: Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengkoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan menguatkan kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi lembaga yang independen dan terpercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

Misi 3: Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Statistik yang Efektif dan Efisien

Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya:

Tujuan 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan

Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan *insight* yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, sekaligus memperkuat peran aktif BPS



menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS).

Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien

Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional (SSN). SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya visi BPS sebagai lembaga terpercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Tujuan 3 Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik

Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik. Tata kelola yang baik merupakan landasan yang mendukung kedua tujuan lainnya. Tata kelola yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien memastikan bahwa BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan efisiensi dalam operasional dan akuntabilitas yang tinggi, BPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Sasaran strategis ini mencerminkan upaya BPS dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia utama informasi statistik yang dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh



pemangku kepentingan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik sektoral yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik. Untuk menilai keberhasilan sasaran ini, BPS menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKKS) berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) 2025, visi, misi, dan tujuan pada tingkat Direktorat Statistik Keuangan Teknologi Informasi, dan Pariwisata belum dapat



ditetapkan.

2.2 Target Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta mendukung tercapainya kebijakan lembaga yang tertuang dalam Target Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029, maka Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan yang mencerminkan hasil (*output*) dari program dan kegiatan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur menggunakan indikator kinerja sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan target kinerja sebagai tolok ukur pencapaian pada periode pelaporan. Adapun Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Statistik KTIP Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan					
SS1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan					
1.3.5. Terwujudnya penyediaan data dan <i>insight</i> Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas					
1.3.5.1. Persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.6. Tersedianya Data 5 Sasaran Visi IE dan 45 IUP Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata					



Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3.6.1. Persentase indikator sasaran visi Indonesia Emas dan 45 indikator utama pembangunan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	-	66,67	100,00	100,00	100,00
T2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien SS2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu					
2.3.3. Terwujudnya pembinaan Statistik Sektoral K/L Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata					
2.3.3.1. Tingkat keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	74,41	80,48	81,28	88,98	92,98

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Pada awal tahun 2025 ditetapkan target dari masing-masing indikator, tujuan dan sasaran kegiatan yang harus dicapai selama setahun dan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen pimpinan organisasi/unit kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. PK Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025 telah menyesuaikan dengan Rencana Strategis BPS Tahun 2025-2029. Target PK Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.



Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)
1.3. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas		
1.3.5 Persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	Persen	100,00
2.3. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata		
2.3.3. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Poin	74,41

2.4 Dukungan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan dukungan strategis terhadap Prioritas Nasional (PN) melalui penyediaan data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipercaya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan nasional.

PRIORITAS NASIONAL

1. Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi

Pemanfaatan *Big Data* untuk statistik resmi merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan untuk memperkuat penyediaan data dan informasi statistik yang relevan, akurat, dan tepat waktu dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan. *Big Data*, seperti data administrasi, data transaksi digital, dan data berbasis teknologi informasi lainnya, menjadi sumber data alternatif yang strategis untuk melengkapi data statistik konvensional. Melalui pemanfaatan *Big Data*, diharapkan statistik resmi dapat menggambarkan dinamika sosial dan ekonomi secara lebih cepat dan granular, sehingga mampu menjawab kebutuhan data yang semakin kompleks.



Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan *Big Data* untuk statistik resmi dilakukan melalui penguatan metodologi, infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pihak swasta sebagai pemilik data, dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola data, perlindungan data pribadi, dan prinsip kerahasiaan statistik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas statistik resmi sekaligus mendorong inovasi statistik dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata memiliki peran penting dalam pemanfaatan *Big Data* untuk statistik resmi yaitu dalam penyediaan data statistik wisatawan nusantara, wisatawan nasional dan wisatawan mancanegara menggunakan *Mobile Positioning Data*.

2. Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata memiliki peran penting dalam penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai pembina statistik pada 6 (enam) kementerian/lembaga pada tahun 2025 meliputi Kementerian Pariwisata, Badan



Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Digital, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI).

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana kerja Tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas kinerja melalui penguatan tata kelola, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Seluruh rencana kerja dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan hasil (*result-oriented*), sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja.

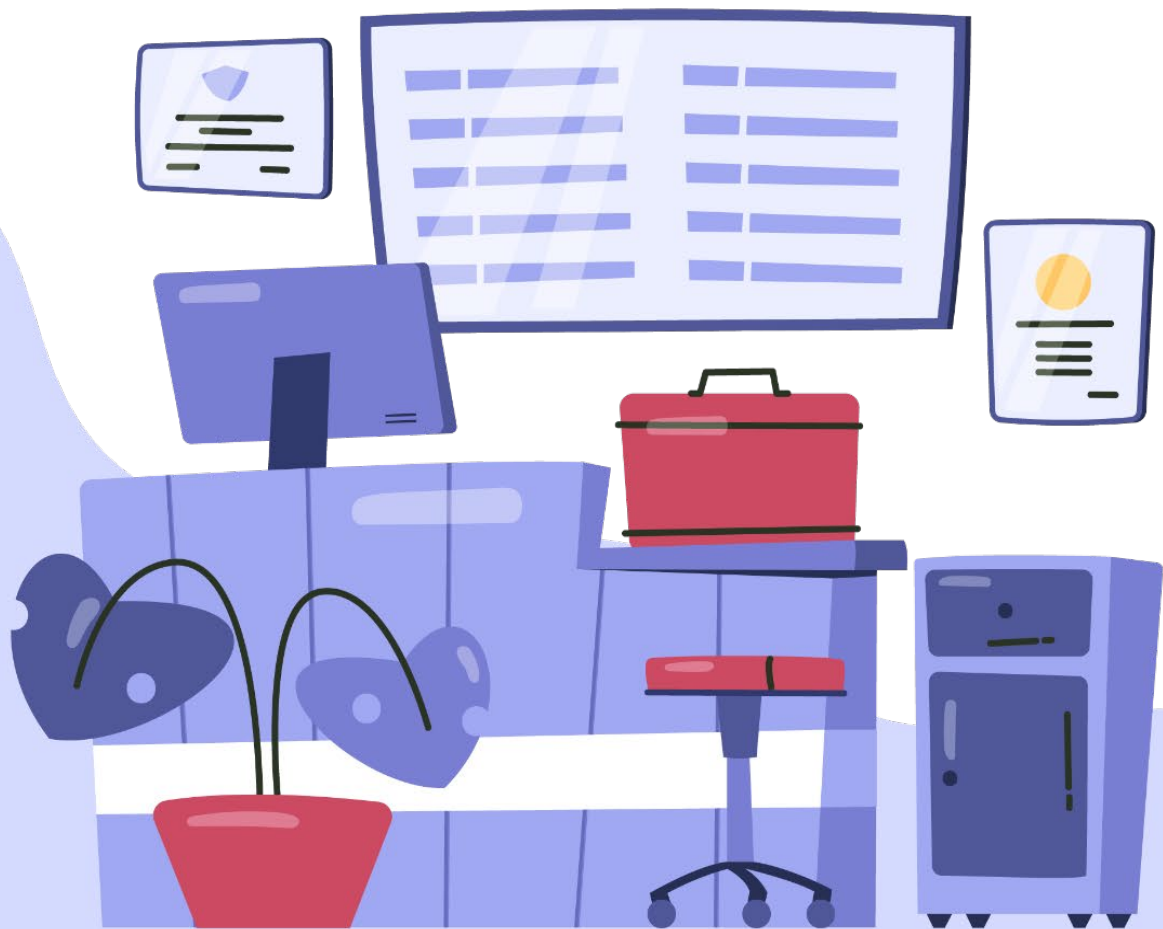
Untuk mewujudkan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar 3,95 milyar rupiah (tertuang dalam dokumen PK Dit. Stat. KTIP tanggal 24 Januari 2025) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata melalui program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Ditengah periode terdapat penambahan anggaran sehingga total anggaran untuk kegiatan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebesar 4,27 miliar rupiah (sebelum *self-blocking*). Jumlah anggaran yang bisa digunakan sebesar 711,68 juta rupiah (setelah *self-blocking*). Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Output Kegiatan	Pagu Awal Tahun 2025	Pagu Revisi Terakhir	Self-Blocking Tahun 2025	Pagu yang Dapat Digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2908.BDB.100 Pembinaan Statistik Sektoral	299.800.000	299.800.000	266.300.000	33.500.000
2908.BMA.004 Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	2.559.043.000	2.854.147.000	2.295.194.000	558.953.000
2908.BMA.009 Statistik E-Commerce	1.094.038.000	1.112.700.000	993.475.000	119.225.000



Output Kegiatan	Pagu Awal Tahun 2025	Pagu Revisi Terakhir	Self-Blocking Tahun 2025	Pagu yang Dapat Digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah	3.952.881.000	4.266.647.000	3.554.969.000	711.678.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja merupakan analisis keterkaitan antara sasaran strategis program dan kegiatan, indikator kinerja, pengukuran capaian kinerja, dan evaluasi capaian kinerja selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi/unit kerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Capaian kinerja tahun 2025 merepresentasikan keberhasilan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata dalam memenuhi dua sasaran strategis yang diukur melalui dua indikator kinerja utama. Hasil ini mencerminkan performa keseluruhan unit kerja di lingkungan direktorat, sekaligus menegaskan komitmen terhadap visi dan misi BPS.

Secara umum, kegiatan penyediaan data statistik sepanjang tahun 2025 terlaksana dengan sangat baik. Hal tersebut tercermin dari konsistensi realisasi kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 4. Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan SS1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan				
1.3.5. Terwujudnya penyediaan data dan <i>insight</i> Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas				



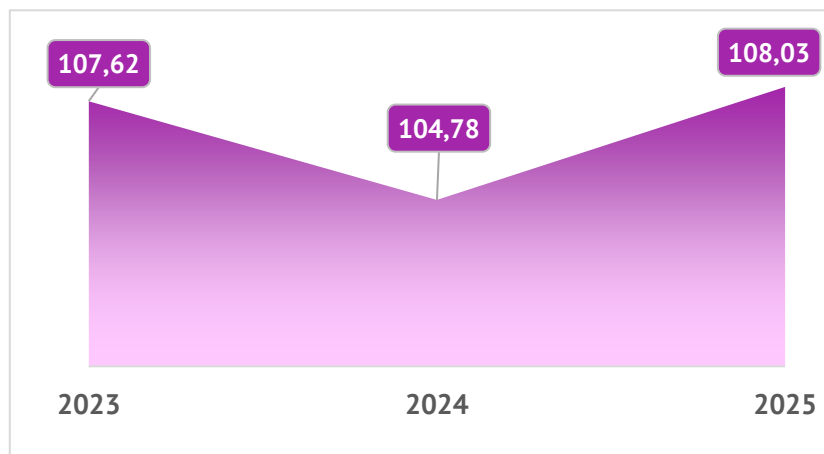
Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.3.5.1. Persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00
T2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien SS2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu				
2.3.3. Terwujudnya pembinaan Statistik Sektoral K/L Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata				
2.3.3.1. Tingkat keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Poin	74,41	86,36	116,06
Rata-Rata Capaian Kinerja				108,03

Pada tabel 5 terlihat bahwa sampai dengan Desember 2025, rata-rata hasil capaian kinerja sasaran strategis utama Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata mencapai 108,03 persen. Pada sasaran strategis pertama memiliki nilai kinerja mencapai 100,00 persen, sementara kinerja pada sasaran strategis kedua sebesar 116,06 poin.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun kinerja tahun 2025 merupakan kinerja tahun pertama pada Rencana Strategis Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata 2025-2029.

a. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2023-2025

Perkembangan capaian kinerja total Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata selama tahun 2023 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Perkembangan Capaian Kinerja Total Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata 2023- 2025

Perkembangan capaian kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata selama periode 2023–2025 ditunjukkan dalam Gambar 8. Dalam kurun waktu tersebut, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata secara konsisten berhasil melampaui target yang ditetapkan, sebagaimana tercermin dari nilai capaian kinerja yang berada di atas 100 persen. Capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing mencapai 107,62 persen dan 104,78 persen. Sedangkan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 108,03 persen kembali melampaui target, sejalan dengan tren positif yang telah dicapai pada tahun 2023 dan 2024. Perbedaan nilai antar tahun tersebut relatif kecil, menegaskan stabilitas serta keberlanjutan pencapaian Direktorat dalam mendukung visi dan misi BPS.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program. Evaluasi ini dihitung berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi indikator pada masing-masing sasaran. Capaian tahun 2025 menjadi bagian dari perjalanan strategis jangka menengah, yakni tahun pertama pelaksanaan Renstra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata 2025–2029.

b. Capaian Nilai Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatut Negara Reformasi Birokrasi nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO), yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas



dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Predikat PKO digolongkan menjadi lima, dimana pembagiannya adalah sebagai berikut:

Predikat PKO

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Gambar 9. Predikat PKO Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi

Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

Gambar 10. Interpretasi Predikat PKO

Nilai koreksi normalisasi capaian PK untuk penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berdasarkan predikat AKIP yang dicapai oleh unit kerja. Nilai SAKIP 2025 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata mencapai 72,35 dengan predikat AKIP yaitu BB/Sangat Baik. Dengan predikat AKIP tahun 2025 yaitu BB/Sangat Baik maka nilai koreksi normalisasi capaian PK pada Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebesar 10 persen. Capaian Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 5. Capaian Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)		
		Normalisasi Capaian PK *)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP **)	Nilai Akhir Capaian PK = (3)x(100%-(4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.3.1 Persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	100,00	100,00	10%	90
2.3.3.1 Tingkat keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Dir. Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	116,06	110,00	10%	99
Total Capaian PK				189
NKO Rata-rata Capaian PK				94,5
Predikat PKO				BAIK

Catatan:

*Jika nilai capaian kinerja ≥ 110 , maka normalisasi capaian PK sebesar 110

**Jika nilai SAKIP = BB/Sangat Baik, maka koreksi normalisasi capaian PK sebesar 10%

Nilai akhir capaian PK tahun 2025 pada indikator 1.3.3.1 Persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas sebesar 90 persen dan indikator 2.3.3.1 Tingkat keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Dir. Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebesar 99 persen. Sehingga total capaian PK mencapai 189. Nilai Kinerja Organisasi rata-rata capaian PK pada Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebesar 94,5 dengan predikat Baik. Artinya tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja di Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

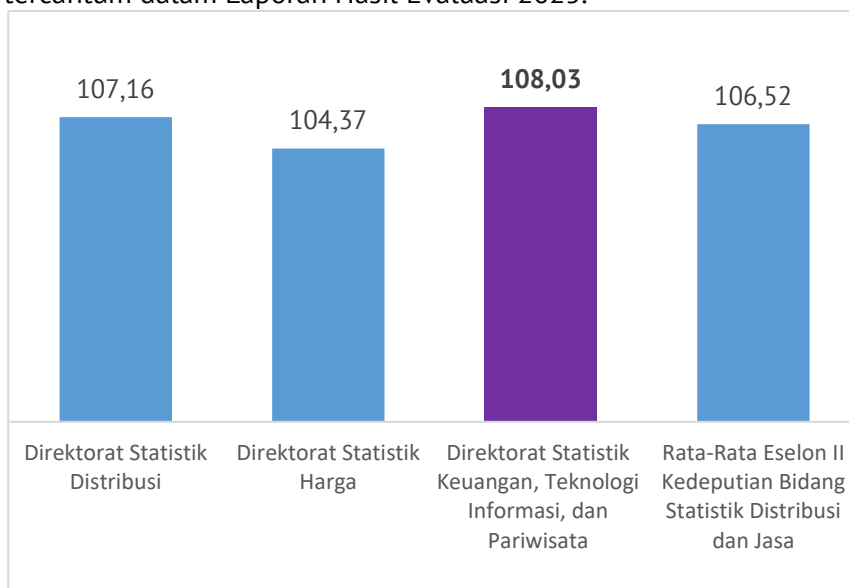
c. Benchmarking Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menunjukkan capaian lebih tinggi dibandingkan rata-rata unit kerja Eselon II di lingkungan Kedeputusan Bidang



Statistik Distribusi dan Jasa. Keberhasilan ini dicapai melalui berbagai langkah strategis, antara lain respons cepat terhadap kendala lapangan seperti penggantian sampel usaha, disiplin dalam manajemen waktu dan kegiatan, serta komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pihak internal maupun eksternal.

Inovasi juga berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan, termasuk percepatan pengolahan data, publikasi tepat waktu, dan pemanfaatan sumber data administratif. Ke depan, Direktorat berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja melalui evaluasi dan penguatan manajemen waktu serta kegiatan, guna menghasilkan data dan statistik yang berkualitas serta tepat waktu. Dalam pembinaan statistik sektoral, Direktorat akan memperkuat komunikasi dan pendampingan, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi atas nilai SAKIP sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi 2025.



Gambar 11. Capaian Kinerja Direktorat dan Rata-rata Kinerja Direktorat di Kedeputan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata memiliki kinerja yang lebih tinggi (108,03 persen) dibandingkan Direktorat Statistik Distribusi (107,16 persen), Direktorat Statistik Harga (104,37 persen), dan rata-rata capaian kinerja Eselon II pada Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (106,52 persen). Berdasarkan hasil tersebut, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata telah mengidentifikasi upaya yang telah diterapkan selama tahun 2025 ini yang berpengaruh besar



dalam pencapaian kinerja yang baik tersebut yaitu penguatan tata kelola kegiatan statistik melalui kepemimpinan yang adaptif, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta komitmen terhadap peningkatan kualitas output kinerja.

d. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per Sasaran Strategis Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2023-2025

Tabel 6. Sasaran Kegiatan, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja 2023-2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1.3. Terwujudnya penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas										
1.3.5. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	N/A (Belum dijadikan indikator)		100,00
Sasaran 2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata										
2.3.3. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	74,41	N/A (Belum dijadikan indikator)	86,36	N/A (Belum dijadikan indikator)	116,06			

e. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta mendukung tercapainya kebijakan di level BPS, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (*output*) dari program dan kegiatan Direktorat Statistik KTIP pada tahun 2025. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran



strategis sebagai berikut:

Tujuan 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan

Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai Visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, serta memperkuat peran aktif BPS dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sasaran strategis kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pertama dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Sasaran strategis pertama BPS berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang tidak hanya berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan *insight* atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis. Sasaran ini mencerminkan upaya BPS dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia utama informasi statistik yang dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas. Indikator ini merepresentasikan seberapa banyak publikasi/laporan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata berkualitas yang dihasilkan oleh Direktorat. Pada tahun 2025, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pertama sebesar 100,00 persen.



Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan SS1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan				
1.3.5. Terwujudnya penyediaan data dan <i>insight</i> Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas				
1.3.5.1. Persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00

1.3.5.

INDIKATOR KINERJA:

“Persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas”

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator kinerja “Persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas” ditujukan untuk melihat capaian kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata dalam penyediaan data dan *insight* statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang berkualitas.

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata berhasil merealisasikan publikasi statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Dalam mencapai indikator kinerja ini, target publikasi berkualitas yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 30 publikasi/laporan. Capaian kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi,



dan Pariwisata tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata berhasil merealisasikan dari target sebanyak 30 publikasi yang terbit secara tepat waktu, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100,00 persen. Daftar publikasi/laporan yang dihasilkan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata selama tahun 2025 ditampilkan pada Lampiran 5.

Pencapaian ini terwujud karena target yang ditetapkan sesuai dengan kapasitas kerja Direktorat, serta seluruh proses penyusunan publikasi berjalan lancar sesuai rencana. Disiplin manajemen waktu, koordinasi antar-unit, dan pemanfaatan teknologi informasi mendukung ketepatan waktu penerbitan. Selain itu, penggunaan sumber data administratif turut memperkuat kualitas publikasi yang dihasilkan.

Dengan capaian penuh pada indikator utama, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menegaskan komitmennya dalam menyediakan data dan *insight* yang berkualitas, sekaligus mendukung sasaran strategis BPS secara konsisten dan berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas selama tahun 2025 yaitu:

- a. Kebijakan efisiensi anggaran memberikan implikasi terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan strategis antara lain:
 - Tidak tersedianya biaya pencetakan kuesioner untuk kegiatan survei lembaga keuangan, survei keuangan pemerintah desa dan survei BUMD di awal tahun.
 - Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelatihan petugas survei e-commerce sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan dukungan anggaran.
 - Tidak tersedianya honor pengajar Instruktur Nasional (Innas) dan Instruktur Daerah (Inda) pada Survei E-Commerce, yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi penyampaian materi survei.
 - Tertundanya pelaksanaan pendataan survei tahunan seperti survei penyediaan makanan minuman, survei objek daya tarik wisata, dan survei hotel dan akomodasi lainnya. Penundaan ini berdampak pada penyesuaian *timeline* kegiatan.



- b. Ketersediaan data sekunder yang bersumber dari K/L teknis terkait berdampak langsung pada proses kompilasi data, sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu rilis publikasi/laporan statistik.
- c. Proses pengadaan MPD Wisatawan Mancanegara belum bisa dilaksanakan di awal tahun.
- d. *Respon rate* pada survei digital wisatawan nusantara dan wisatawan nasional tidak mencapai target yang diharapkan.
- e. Penggunaan aplikasi FASIH pada pelaksanaan pengumpulan data berbasis CAPI, masih menghadapi kendala teknis, khususnya *error system* dan keterbatasan konektivitas jaringan di lapangan. Hal ini berdampak pada kelancaran proses input dan sinkronisasi data.
- f. Perbedaan struktur data antara Updating Direktori dan Survei Bidang Jasa Pariwisata menyebabkan kesulitan dalam proses penggabungan data.

Solusi yang dilakukan ketika menghadapi kendala dalam mencapai indikator kinerja persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas selama tahun 2025 antara lain:

- a. Dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran berikut beberapa yang dilaksanakan:
 - Mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk biaya pencetakan kuesioner survei lembaga keuangan, survei keuangan pemerintah desa, dan survei BUMD.
 - Melakukan penyesuaian SOP pelatihan survei e-commerce, yang semula dilaksanakan di Tingkat provinsi menjadi di tingkat kabupaten/kota, sebagai bentuk efisiensi tanpa mengurangi substansi materi.
 - Mengusulkan penambahan anggaran honor pengajar untuk mendukung pelatihan petugas survey agar kualitas penyampaian materi tetap terjaga.
 - Melakukan penyesuaian *timeline* pelaksanaan kegiatan survei tahunan dengan tetap mempertahankan standar metodologi dan kualitas data.
- b. Penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait melalui optimalisasi komunikasi formal dan pemanfaatan forum koordinasi teknis.
- c. Melakukan koordinasi intensif dengan pihak yang terkait proses administrasi pengadaan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, dan Biro Hukum. Selain itu, dilakukan *clearance* dengan Kementerian PANRB, Bappenas



dan Kementerian Komunikasi dan Digital guna memastikan kesesuaian regulasi dan percepatan proses persetujuan.

- d. Penyampaian surat himbuan kepada pegawai BPS untuk meningkatkan partisipasi responden internal. Selain itu, melakukan koordinasi dengan Biro Humas untuk menyusun narasi *SMS-Blast* yang lebih komunikatif dan persuasif. Serta melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pariwisata sebagai salah satu pengguna data untuk mendukung pelaksanaan survey digital.
- e. Melakukan koordinasi dengan Tim Sistem Informasi Statistik untuk penanganan teknis dan perbaikan sistem. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan stabilitas aplikasi serta meminimalkan dampak terhadap proses input dan sinkronisasi data.
- f. Melakukan proses *bridging* atau penyelarasan struktur data pada seluruh cakupan kegiatan updating direktori.

Secara keseluruhan, berbagai upaya perbaikan yang dilakukan mencerminkan komitmen Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata dalam menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan guna menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas publikasi statistik sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Rekomendasi perbaikan kinerja (rencana tindak lanjut) tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi lebih intens dengan K/L terkait kegiatan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.
- b. Melakukan rapat evaluasi dan mereview pertanyaan pada kuesioner survei digital wisatawan nusantara dan wisatawan nasional, serta melakukan sosialisasi survei digital lebih awal.

Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien

Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga terpercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan



kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat.

Peran ini semakin relevan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menempatkan BPS sebagai pembina data untuk menjamin keterpaduan dan interoperabilitas data nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menegaskan bahwa BPS dibentuk untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir, dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, yang menyatakan bahwa BPS bertugas membina seluruh penyelenggara kegiatan statistik di Indonesia.

Dengan landasan regulasi tersebut, jelas bahwa pembinaan statistik sektoral bukan hanya tugas teknis, tetapi merupakan mandat strategis untuk memastikan keterpaduan sistem statistik nasional.

Pencapaian tujuan ini didukung oleh satu sasaran strategis digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa persentase publikasi/laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas. Indikator ini merepresentasikan seberapa banyak publikasi/laporan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata berkualitas yang dihasilkan yakni “Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu”. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menjalankan tujuan ini melalui peningkatan komunikasi, koordinasi, pendampingan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kementerian/lembaga mitra. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, sehingga SSN dapat terwujud secara andal, efektif, dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional.

Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. SSN yang baik menjadi fondasi penting bagi kebijakan publik yang berbasis bukti. Selain itu, dengan adanya penyelenggaraan SSN yang terpadu, seluruh K/L/D/I mampu mendukung perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif.



Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana keberhasilan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan Direktorat kepada K/L mitra, melalui indeks komposit dari 2 variabel pembentuk, yakni:

1. Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Standar
2. Normalisasi kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat dalam penyelenggaraan statistik Sektoral.

Rincian target, realisasi, dan capaiannya dapat dilihat pada Tabel 7. Indikator tersebut mampu berkinerja dengan baik hingga melampaui target di tahun 2025 sebesar 116,06 persen.

Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Tenologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien SS2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu				
2.3.3. Terwujudnya pembinaan Statistik Sektoral K/L Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata				
2.3.3.1. Tingkat keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Poin	74,41	86,36	116,06

2.3.3.1 **INDIKATOR KINERJA:**
“Tingkat keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata”

Indikator ini digunakan untuk melihat komitmen Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata dalam menjalankan mandat BPS sebagai pembina kegiatan statistik sektoral. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menargetkan sebanyak 74,41 poin tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral untuk K/L/D/I dapat



direalisasikan. Realisasinya, tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral terlaksana 86,36 poin, sehingga capaian kinerja yang diraih sebesar 116,06 persen.

Target K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik sektoral ada sebanyak 5 K/L/D/I, yaitu:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
2. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF),
3. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),
4. Kementerian Pariwisata (Kemenpar),
5. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), dan
6. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata telah melakukan seluruh aktivitas pembinaan statistik sektoral yang telah direncanakan sepanjang tahun 2025 sehingga target telah tercapai lebih dari 100 persen. Rincian aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan pada tahun 2025, antara lain:

Triwulan I:

- Penyusunan Tim PSS Direktorat Statistik KTIP dan Deputi DSDJ.
- Internalisasi Awal PSS 2025 kepada seluruh anggota Tim PSS Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.
- Rapat Internal pembahasan petunjuk teknis dan rencana kerja pembinaan statistik sektoral DSKTIP.
- Koordinasi dengan K/L terkait permohonan audiensi dan dilanjutkan kegiatan pembinaan terkait identifikasi kegiatan statistik.

Triwulan II:

- *Fullday Meeting* Kick-off Pembinaan Statistik Sektoral dan Identifikasi Kegiatan Statistik Kementerian/Lembaga Tahun 2025 pada tanggal 22 April 2025 bersama 6 (enam) K/L mitra.
- *Fullday Meeting* Pembinaan Kualitas Data pada tanggal 20 Mei 2025 bersama 6 (enam) K/L mitra.
- Rapat Monitoring dan Evaluasi Mandiri Pembinaan Statistik Sektoral DSKTIP semester 1 Tahun 2025 pada tanggal 18 Juni 2025

Triwulan III:



- *Fullday Meeting* Pembinaan Metadata dan Standar Data Statistik pada tanggal 30 Juni 2025 bersama 6 (enam) K/L mitra.
- *Fullday Meeting* Pembinaan domain Proses Bisnis Statistik pada tanggal 22 Juli 2025 bersama 6 (enam) K/L mitra.
- *Fullday Meeting* Pembinaan domain Kelembagaan dan domain Sistem Statistik Nasional pada tanggal 19 Agustus 2025 bersama 6 (enam) K/L mitra.

Triwulan IV:

- Pembinaan berbentuk konsultasi juga dilakukan melalui Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Statistik bersama dengan LPP RRI tanggal 14 Oktober 2025
- *Focus Group Discussion* Tata Kelola Kegiatan Statistik bersama 6 K/L mitra pembinaan DSKTIP tanggal 19 November 2025.
- Rapat Monitoring dan Evaluasi Mandiri Pembinaan Statistik Sektorial DSKTIP semester 2 pada tanggal 22 Desember 2025.

Dalam hal indikator tingkat keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial kendala yang dialami Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata selama tahun 2025 yaitu:

- a. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan pembinaan statistik sektorial dengan K/L mitra tidak bisa dilakukan secara tatap muka.
- b. Kesulitan dalam menyelaraskan jadwal pelaksanaan pembinaan antara Kementerian/Lembaga mitra dengan Tim Pembina Statistik Sektorial Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.
- c. Penyerapan anggaran pembinaan statistik sektorial pada komponen transport lokal belum optimal.

Solusi yang dilakukan adalah dalam menghadapi kendala saat melakukan pembinaan statistik sektorial selama tahun 2025 yaitu:

- a. Pembinaan dilakukan secara daring agar bisa tetap berdiskusi dengan pihak K/L mitra serta melakukan pendampingan yang intensif kepada K/L mitra dengan predikat Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2024 yakni kurang dari 2,6 poin.
- b. Koordinasi lebih inten dengan K/L mitra guna memastikan kesesuaian waktu dan efektivitas kegiatan pembinaan statistik sektorial.



- c. Melaksanakan FGD Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) secara luring mengundang walidata dan produsen data dari enam K/L mitra.

Adapun rekomendasi perbaikan kinerja dan rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral tahun 2026 yaitu melakukan penyusunan jadwal dan perencanaan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) kepada K/L mitra sejak awal tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Sementara untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata secara reguler melaporkan dokumentasi aktivitas pembinaan statistik sektoral melalui aplikasi PSS yang disiapkan oleh BPS, serta melakukan rapat money tiap akhir semester.

Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pembinaan statistik sektoral yang dilakukan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata melalui peningkatan komunikasi, koordinasi, serta pendampingan kepada kementerian/lembaga mitra. Lebih lanjut, capaian ini juga didukung oleh pembentukan mekanisme koordinasi yang terarah, yang memastikan setiap kegiatan pembinaan berjalan konsisten sesuai rencana. Selain itu, pantauan evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata untuk segera mengidentifikasi kendala, menindaklanjuti rekomendasi, dan menjaga kualitas pembinaan. Dengan kombinasi koordinasi yang efektif dan evaluasi berkesinambungan, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan berkelanjutan.

3.2 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Terhadap Target Renstra 2025-2029

Rincian perbandingan capaian kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2025 terhadap Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 6.



Tabel 9. Sasaran Program, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja 2025 dan 2029

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1.3.5. Terwujudnya penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas						
1.3.5.1. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sasaran 2.3.3. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata						
2.3.3.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	Poin	74,41	92,98	86,36	116,06	92,88

Realisasi sasaran strategi pertama Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata pada tahun 2025 sebesar 100,00 persen. Capaian kinerja terhadap target 2025 mencapai 100,00 persen, sedangkan capaian terhadap target tahun 2029 adalah 100,00 persen.

Realisasi sasaran strategi kedua tahun 2025 yaitu 86,36 poin, melampaui target 2025 sebesar 74,41 poin. Oleh karena itu, capaian terhadap target tahun 2025 adalah 116,06 persen. Sedangkan capaian terhadap target tahun 2029 adalah 92,88 persen.

Secara umum, ketercapaian target kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata pada tahun 2025 didukung beberapa faktor utama, baik dari aspek perencanaan, sumber daya, maupun dukungan sistem dan pemangku kepentingan.

Pertama, perencanaan kinerja yang selaras dan konsisten antara dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan rencana aksi tahunan mendorong ketercapaian indikator kinerja secara lebih terarah. Penetapan indikator yang terukur dan relevan dengan tugas dan fungsi direktorat memudahkan proses pemantauan serta pengendalian kinerja sepanjang tahun berjalan.

Kedua, penerapan manajemen kinerja yang semakin efektif melalui monitoring dan evaluasi berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi capaian *respon rate* survei.



Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga pelaksanaan kegiatan berada pada jalur dan jadwal pencapaian target yang ditetapkan.

Ketiga, dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan dan kompetensi SDM yang relatif memadai, berkontribusi positif terhadap kualitas dan ketepatan waktu capaian kinerja. Sinergi antara pegawai sangat mendukung kelancaran proses persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data.

Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis statistik turut meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Penggunaan sistem pengumpulan data berbasis elektronik, integrasi pengolahan data, serta *dashboard* monitoring kinerja mendukung percepatan penyelesaian *output* dan peningkatan akurasi data.

Kelima, koordinasi dan kerja sama yang baik dengan *stakeholder* terkait menjadi faktor penting dalam penyediaan data sekunder. Pemanfaatan data administrasi dan peningkatan komitmen instansi mitra berkontribusi terhadap keberlanjutan penyediaan data statistik yang relevan dan berkualitas.

Di samping faktor pendorong, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi ketercapaian target kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata pada tahun 2025.

Pertama, ketidakpastian anggaran pada tahun 2025 memberikan pengaruh terhadap capaian kinerja, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan sumber daya. Ketidakpastian alokasi anggaran berdampak pada ketidakpastian pelaksanaan kegiatan yang memerlukan persiapan teknis dan koordinasi lintas unit serta lintas instansi. Kondisi ini mendorong penyesuaian jadwal pelaksanaan yang berpotensi menurunkan ruang fleksibilitas dalam pengendalian *output* kegiatan.

Kedua, kebijakan efisiensi anggaran meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya dan menambah beban kerja pada SDM yang tersedia. Peningkatan intensitas kerja pada periode tertentu berpotensi mempengaruhi keberlanjutan kinerja dan menimbulkan risiko keterlambatan penyelesaian kegiatan.

Ketiga, kendala teknis pada sistem dan infrastruktur teknologi informasi saat sebagian besar kegiatan pengumpulan data menggunakan metode *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *android*, terkait penyesuaian aplikasi maupun stabilitas jaringan. Hal ini berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data.



Secara keseluruhan, capaian kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2025 menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja telah berjalan secara efektif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam penguatan kualitas data, kapasitas SDM, dan integrasi sistem informasi. Temuan ini menjadi dasar bagi perumusan langkah perbaikan keberlanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Capaian pembangunan tahun 2025 menutup periode RPJMN 2020–2024 dengan fokus pada konsolidasi hasil, pencapaian target prioritas nasional, serta penyiapan transisi menuju RPJMN 2025–2029. RKP 2025 (Perpres No. 109 Tahun 2024) menetapkan capaian prioritas nasional, prioritas presiden, dan isu strategis nasional sebagai landasan kebijakan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".



Sumber: RKP 2025, Perpres Nomor 109 2024

Gambar 12. Tema Pembangunan RKP Tahun 2025

RKP 2025 tetap berpedoman pada 8 Prioritas Nasional yang telah ditetapkan, dengan capaian yang diukur melalui indikator pembangunan:

1. **Prioritas Nasional 1**

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. **Prioritas Nasional 2**

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. **Prioritas Nasional 3**

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. **Prioritas Nasional 4**



Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

5. **Prioritas Nasional 5**

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. **Prioritas Nasional 6**

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. **Prioritas Nasional 7**

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. **Prioritas Nasional 8**

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar muat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RKP 2025 juga mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang harus ditangani secara lintas sektor:

- a. Ketidakpastian global: fluktuasi harga energi dan pangan, serta dinamika geopolitik.
- b. Perubahan iklim: ancaman bencana hidrometeorologi, kenaikan emisi, dan degradasi lingkungan.
- c. Kesenjangan wilayah dan sosial: masih adanya disparitas pembangunan antar wilayah.
- d. Transformasi digital: kebutuhan percepatan adopsi teknologi untuk layanan publik dan ekonomi.
- e. Ketahanan fiskal: menjaga defisit anggaran dan pembiayaan pembangunan tetap terkendali.

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata ikut berperan dalam mendukung program prioritas nasional, prioritas presiden, dan isu strategis nasional melalui dukungan ketersediaan data dengan pelaksanaan aktivitas:

1. Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik resmi melalui aktivitas Survei Wisatawan Nusantara dan Passenger Exit Survey (PES), guna mendukung program prioritas ke-3 yaitu



- “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”,
2. Pembinaan Statistik Sektor dalam rangka mendukung penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) dan penyediaan indikator prioritas nasional yang berkualitas.
 3. Laporan Kerja sama *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* Bidang Statistik
 4. Program Makan Bergizi Gratis → data sosial-ekonomi BPS menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program.
 5. Pelaksanaan Sensus Ekonomi sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang statistik yang memberikan mandat kepada BPS untuk menyediakan data ekonomi komprehensif.

SURVEI STATISTIK WISATAWAN NUSANTARA

Survei Wisatawan Nusantara bertujuan untuk mendapatkan data mengenai jumlah perjalanan, lama tinggal, jumlah pengeluaran, demografi, jenis akomodasi dan moda angkutan. Sejak tahun 2020, metode survei ini tidak lagi dengan survei konvensional, melainkan memanfaatkan *Mobile Positioning Data (MPD)*. Dengan memanfaatkan MPD, penghitungan jumlah perjalanan dan lama tinggal wisatawan nusantara (wisnus) lebih akurat. Data MPD yang tersedia adalah data kabupaten/kota asal, kabupaten/kota tujuan, dan bulanan seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan data jumlah pengeluaran, demografi, jenis akomodasi dan moda angkutan dilakukan survei digital yang dilakukan oleh provider terhadap responden yang terpilih sampel.

Output dari Survei Wisatawan Nusantara berupa publikasi Statistik Wisatawan Nusantara Tahun 2025 dan Berita Resmi Statistik (BRS) Statistik Pariwisata yang dirilis secara rutin setiap bulan.

Kendala yang dihadapi adalah proses pengadaan MPD yang belum dapat dilaksanakan pada awal tahun, serta *respon rate* survei digital relatif rendah dibandingkan target sampel.

Dan solusi yang telah dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut adalah melakukan koordinasi intensif dengan pihak yang terkait proses administrasi pengadaan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, dan Biro Hukum.



Sedangkan untuk meningkatkan *respon rate* survei digital wisatawan nusantara, solusi yang dilakukan antara lain membuat surat himbuan kepada pegawai BPS mengisi survei digital, melakukan koordinasi dengan Biro Humas untuk menyusun narasi *SMS-Blast* yang lebih komunikatif, serta melakukan koordinasi dengan salah satu provider telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan survei digital.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan ke depan antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi survei digital wisatawan nusantara secara lebih dini guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi responden. Selain itu akan dilakukan reviu rincian pertanyaan pada kuesioner survei digital agar lebih jelas, sederhana, dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan kemudahan pengisian serta kualitas data yang dihasilkan.

PASSENGER EXIT SURVEY (PES)

Kegiatan pendataan survei Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dikenal di dunia Internasional dengan sebutan *Passenger Exit Survey* (PES), dikenal juga dengan sebutan *Dispatch Visitor Survey* (DVS). Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk memperoleh data pengeluaran wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia; dan mendapatkan profil dan rute perjalanan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia.

Output dari *Passenger Exit Survey* (PES) berupa Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2024 yang digunakan diantaranya untuk memenuhi keperluan kebijakan kepariwisataan yang diarahkan agar kegiatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain. Sebagaimana sasaran pembangunan pariwisata 2025-2029.

Dalam pelaksanaan kegiatan, masih terdapat beberapa kendala, antara lain distribusi responden yang cenderung menumpuk pada periode triwulanan tertentu maupun pada kebangsaan tertentu, serta masih ditemukannya variabel yang belum terisi atau memiliki nilai yang tidak wajar.

Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan pemanfaatan *dashboard* PES sebagai alat monitoring yang mampu mengidentifikasi anomali dan ketidakwajaran data secara lebih dini. Selain itu, dilakukan evaluasi pengisian secara triwulanan terhadap capaian isian maupun



pemerataan target kebangsaan responden. Upaya perbaikan juga dilakukan melalui proses validasi data guna meningkatkan kualitas dan konsistensi data yang dihasilkan.

Adapun rekomendasi perbaikan kegiatan ke depan diarahkan pada penguatan mekanisme evaluasi secara triwulanan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem pemantauan (*dashboard*) PES sebagai instrumen peringatan dini (*early warning system*) dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat dan berbasis data. Selain itu, perlu penyempurnaan strategi pengumpulan data untuk memastikan pemerataan distribusi responden antar periode pencacahan maupun antar kebangsaan, sehingga kualitas dan keterwakilan data yang dihasilkan semakin baik.

PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

Dalam rangka mendukung penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) dan penyediaan indikator prioritas nasional yang berkualitas, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai walidata dan produsen data sektoral. Pembinaan ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola statistik sektoral agar memenuhi prinsip akurasi, konsistensi, ketepatan waktu, dan relevansi sesuai dengan standar dan kaidah statistik.

Pada tahun 2025, pembinaan statistik sektoral telah dilaksanakan kepada 6 (enam) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Pariwisata, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Digital, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), serta Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI).

Kegiatan pembinaan meliputi penguatan metadata statistik, pendampingan penyusunan indikator kinerja sektoral, harmonisasi definisi dan konsep statistik, reviu kualitas data, serta pendampingan dalam penyusunan rekomendasi statistik. Melalui pembinaan ini, diharapkan K/L mampu menghasilkan data sektoral yang terstandar, terdokumentasi dengan baik, dan dapat digunakan secara optimal dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Hasil pembinaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman K/L terhadap pentingnya tata kelola statistik yang baik, termasuk penerapan prinsip satu data dan penguatan koordinasi internal antar unit penghasil data. Selain itu, proses harmonisasi indikator turut



mendukung konsistensi penyusunan indikator prioritas nasional, khususnya pada sektor keuangan, teknologi informasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Dengan pelaksanaan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata berkontribusi dalam memperkuat kualitas data sektoral serta meningkatkan sinergi antar produsen data dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional.

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2025 adalah kegiatan pembinaan secara *daring* memberikan fleksibilitas dan efisiensi, namun belum sepenuhnya efektif untuk mencapai pemahaman yang mendalam terutama pada K/L binaan dengan predikat nilai IPS "kurang" atau "cukup".

Solusi yang telah dilakukan untuk menghadapi kendala di atas adalah penyampaian materi dibuat lebih interaktif dengan materi yang lebih menarik serta menegaskan kepada K/L binaan bahwa dalam pembahasan pembinaan statistik sektoral diwajibkan untuk mengikutsertakan tim walidata dan produsen datanya, karena keterlibatan walidata dan produsen data merupakan salah satu penilaian dalam capaian penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral.

3.4 Prestasi dan Inovasi

Berbagai prestasi yang berhasil diukir atas kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata pada tahun 2025 antara lain:

1. Penerima penghargaan Mandala Adhi Karya Tingkat Pusat;
2. Insan Statistik Teladan (IST) Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata terpilih mewakili Kedeputan Distribusi dan Jasa;
3. Penerima penghargaan Terbaik Pertama dalam Top 3 Inovasi Pelayanan Publik atas inovasi *Mobile Positioning Data (MPD): Transformasi Pengumpulan Data Wisatawan Nusantara dalam Era Digital*.
4. Penerima penghargaan BERKUALITAS pada Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) domain Kualitas Data dan Aspek Pemanfaatan Data Tahun 2025;
5. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menghadiri berbagai kegiatan statistik di level internasional, antara lain:



- a. *Introduction of Mobile Positioning Data (MPD) for Official Statistics* diselenggarakan oleh *Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific*, tanggal 8 Juli 2025 di Jakarta, Indonesia.
- b. *ASEAN Working Group on Statistics of International Trade in Services (WGSITS)*, tanggal 8-9 September 2025 di Negeri Sembilan, Malaysia.
- c. *The 13th International Monetary Fund Statistical Forum on Measuring Cross-Border Economic and Financial Linkages in a Dynamic World*, tanggal 19-20 November 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat.
- d. *Task Group on Measuring Value (TG-eCOM)* dan *Working Group on Measuring E-Commerce and the Digital Economy, 6th meeting*, tanggal 2-3 Desember 2025 di Jenewa, Swiss.

Inovasi yang dilakukan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata diantaranya:

1. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata melakukan penyesuaian proses bisnis kegiatan yang bersifat efisiensi dengan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya yaitu:
 - Optimalisasi teknologi dalam penyelenggaraan kegiatan perkantoran, melalui rapat virtual, penggunaan portal kolaborasi, email, dan sosial media.
 - Kegiatan pelatihan, rapat, *knowledge sharing* dilakukan secara daring.
 - Melaksanakan kegiatan pelatihan survei melalui *Learning Management System (LMS)* bekerja sama dengan Pusdiklat.
2. Penyusunan *Quality Gate* yang dapat memantau kualitas data yang dihasilkan oleh Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.
3. Pemanfaatan *Big Data* dalam penyediaan statistik pariwisata dengan MPD. Untuk meningkatkan kualitas data, dilakukan penyempurnaan *rule validasi* pada pengolahan data MPD.
4. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata telah menggunakan teknologi *Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI)* untuk Survei *eCommerce*, *Passenger Exit Survey (PES)*, Survei Perusahaan/Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman (VREST), Survei Perusahaan/Usaha Daya Tarik Wisata (VDTW), Survei Hotel tahunan (VHTL), dan Survei Hotel bulanan (VHTS). Serta melakukan input data menggunakan *Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI)* untuk Survei Lembaga Keuangan (SLK) dan Survei Badan Usaha



- Milik Daerah (BUMD). Penggunaan CAPI dan CAWI dapat menghasilkan data yang *cheaper, faster, better, dan easier*.
5. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata memanfaatkan data administratif sebagai pengganti survei untuk menghasilkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 6. Pemanfaatan aplikasi R-studio pada beberapa pengolahan data, seperti data Survei Hotel bulanan (V-HTS), survei penyediaan makanan minuman (VREST) sehingga menjadi lebih efisien.
 7. Pembangunan *Dashboard* Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara.
 8. Mengadakan HARMONI-FEST, suatu kegiatan berupa *fun games*, jalan-jalan atau kegiatan di luar pekerjaan lainnya yang dapat meningkatkan keharmonisan hubungan antar-pegawai. Kegiatan ini diadakan secara bulanan atau dua-bulanan.
 9. Mengadakan *CoachMe Program*, merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan terstruktur yang difokuskan pada pengembangan potensi individu serta peningkatan kinerja pegawai melalui bimbingan personal, penugasan strategis, dan evaluasi berkala. Program ini menciptakan budaya coaching yang berkelanjutan dalam organisasi.
 10. Mengadakan *Funergy (Fun and Energy)*, kegiatan informal yang dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan meningkatkan kebersamaan, memperkuat teamwork, dan menjaga keseimbangan mental-emosional pegawai dalam lingkungan kerja. Aktivitas ini mencakup permainan tim, sesi motivasi, dan kegiatan relaksasi yang dapat memperkuat solidaritas dan meningkatkan semangat kerja tim.
 11. Mengadakan *Coffee Chat*, kegiatan pengembangan komunikasi dan keterampilan bahasa asing yang diadakan secara berkala. *Coffee Chat* mendorong terciptanya SDM yang adaptif, terbuka, dan siap bersaing dalam konteks kerja global.
 12. Pemilihan *Employee of the Month (EOM)*, sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai berprestasi dan berkontribusi nyata dalam pencapaian kinerja. EOM memotivasi peningkatan kinerja dan menciptakan budaya kerja yang kompetitif, produktif, serta penuh semangat.
 13. Mengadakan *KippApp Time*, merupakan sarana evaluasi dan refleksi kinerja yang dilakukan secara rutin. Kegiatan ini mendorong penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas melalui pengukuran dan diskusi capaian individu maupun tim secara sistematis dan terstruktur.



14. Rapat koordinasi data Wisatawan Mancanegara sejak bulan Juli 2025 yang rutin dilaksanakan setiap bulan dengan melibatkan *stakeholder* terkait. Pelaksanaan rapat ini bertujuan sebagai wadah diskusi untuk menyampaikan perkembangan terkini, membahas hambatan teknis maupun administratif, serta mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan data yang telah berjalan.

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Sebagaimana tercantum dalam DIPA Induk Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2025 SP DIPA- 054.01.1.018576/2025 pagu anggaran Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata setelah *self-blocking* ditetapkan sebesar Rp 711.678.000,- untuk pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp 643.175.011,- atau sebesar 90,37 persen dari total pagu yang tersedia. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi, dengan sisa anggaran yang belum digunakan sebesar Rp 68.502.989.

Jika ditinjau menurut sasaran strategis, realisasi anggaran pada sasaran pertama yaitu penyediaan data dan *insight* statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata mencapai Rp 633.065.011 dari pagu Rp 678.178.000, atau sebesar 93,35 persen. Sementara itu, pada sasaran kedua yaitu pembinaan statistik sektoral kementerian/lembaga mitra, realisasi anggaran tercatat Rp 10.110.000 dari pagu Rp 33.500.000, atau hanya 30,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran lebih optimal pada sasaran utama penyediaan data, sedangkan pembinaan sektoral masih memiliki ruang perbaikan dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 10. Sasaran Strategis, Target, Realisasi, Capaian Kinerja, Pagu, Realisasi Anggaran, Persentase Realisasi Anggaran, dan Efisiensi 2025

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi	
Sasaran Strategis 1 Terwujudnya peningkatan pemanfaatan data statistik berkualitas dan <i>insight</i> dalam perumusan dan kebijakan dan pengambilan keputusan									
1.3.5.1	Persentase Publikasi/Lapor an Statistik	Persen	100,00	100,00	100,00	678.178.000	633.065.011	93,35	1,07



Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas								
Sasaran Strategis 2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang baik dan terpadu								
2.3.3.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	Poin	74,41	86,36	116,06	33.500.000	10.110.000	30,12	3,85
Total				108,03	711.678.000	643.175.011	90,37	1,20

Berikut cara menghitung tingkat efisiensi anggaran adalah:

$$Efisiensi\ Anggaran = \frac{Persentase\ Capaian\ Kinerja}{Persentase\ Realisasi\ Anggaran}$$

Berdasarkan Tabel 7, capaian output pada Sasaran Strategis 1 (SS1) adalah 100 persen dengan alokasi Rp 678.178.000 dan realisasi Rp 633.065.011. Hasil perhitungan menunjukkan efisiensi sebesar 1,07 persen, yang berarti terdapat penghematan anggaran dengan tetap mencapai target output penuh. Sementara itu, pada Sasaran Strategis 2 (SS2), capaian output mencapai 116,06 persen dengan alokasi Rp 33.500.000 dan realisasi Rp 10.110.000. Perhitungan efisiensi menghasilkan nilai 3,85 persen, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui target dengan penggunaan anggaran yang jauh lebih kecil. Dengan demikian, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata secara total telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 1,20 persen selama tahun 2025.

Secara keseluruhan, hasil perhitungan efisiensi memperlihatkan bahwa Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata mampu mengoptimalkan penggunaan



anggaran pada tahun 2025. Sasaran utama penyediaan data dan insight statistik terlaksana dengan efisiensi moderat, sedangkan pembinaan statistik sektoral menunjukkan efisiensi yang tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara hemat dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

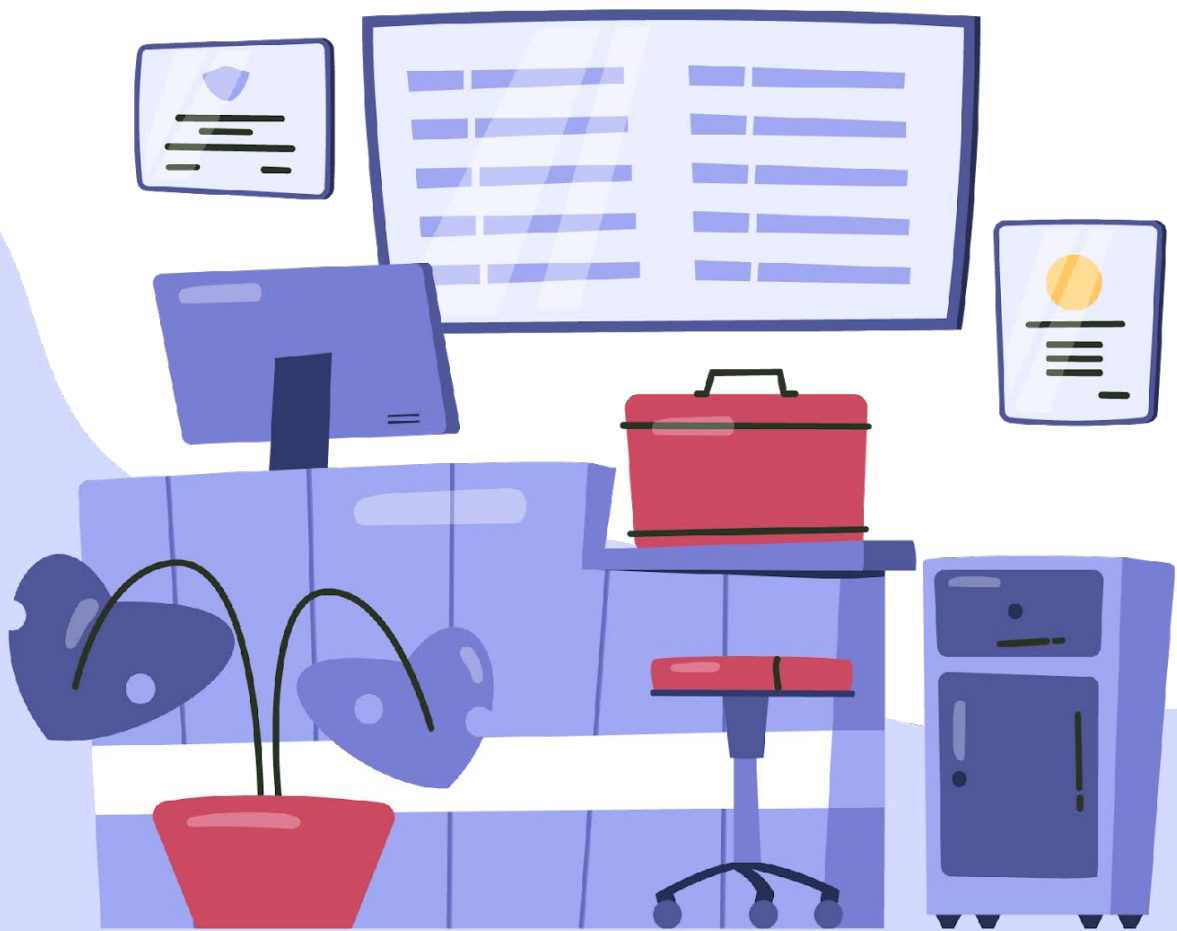
1. Penyesuaian proses bisnis dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Transformasi moda pencacahan dari PAPI ke CAPI dilakukan untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi biaya pengumpulan data.
2. Pemanfaatan rapat virtual, serta pelaksanaan pelatihan dan rekonsiliasi data secara daring.
3. Pemanfaatan TIK dalam proses monitoring survei dan pengolahan data semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Melalui langkah-langkah tersebut, Direktorat KTIP mampu menjaga kualitas *output* statistik dengan prinsip *cheaper, faster, better, and easier*, sekaligus memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan berorientasi hasil.

Penyerapan anggaran APBN harus dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat waktu, serta berorientasi pada pencapaian target kinerja sehingga setiap belanja yang dilakukan benar-benar mendukung hasil pembangunan yang telah direncanakan. Berikut Rekomendasi tindak lanjut dalam dalam penyerapan anggaran tahun depan, yaitu:

1. Meningkatkan komunikasi efektif antara Tim Teknis, Tim Administrasi dan Pengelola Anggaran melalui group percakapan (WAG) dan pertemuan *money* rutin per triwulan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran salah satunya dengan memperhatikan kelengkapan administrasi/SPI sebelum diajukan ke PPK/Biro Keuangan;
3. Menyusun matrik perjalanan triwulanan dengan tetap memperhatikan Prinsip Perjalanan Dinas (Selektif, Ketersediaan Anggaran, Efektif & Efisien, Transparan).





BAB IV

PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas data statistik, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata terus berupaya meningkatkan capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis. Kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar 108,03 persen. Dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) rata-rata capaian PK pada Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebesar 94,5 dengan predikat Baik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik faktor internal seperti jumlah SDM dan alokasi anggaran yang terbatas, maupun faktor eksternal seperti K/L/D/I yang belum bisa memenuhi rekomendasi dan metadata statistik dalam kegiatan pembinaan statistik sektoral. Namun atas arahan dan evaluasi pimpinan yang komprehensif, serta kerja sama dan kolaborasi di lingkungan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, kendala-kendala tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja secara signifikan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai, capaian kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan pertama yaitu menyediakan mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan insight yang relevan, memiliki satu sasaran yaitu terwujudnya penyediaan data dan *insight* Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Yang Berkualitas. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100 persen.
2. Tujuan kedua yaitu mewujudkan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, memiliki satu sasaran yaitu terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 116,06 persen.

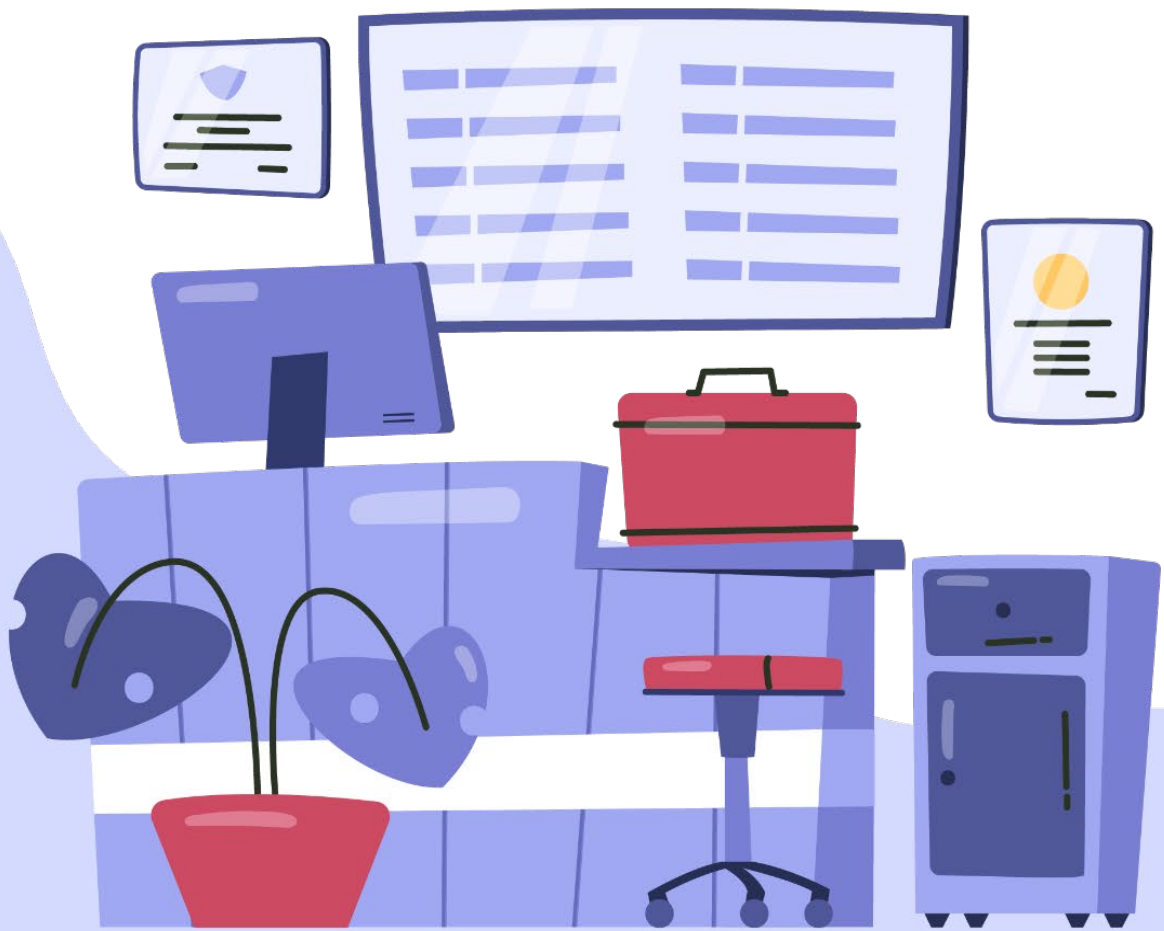
Dengan capaian kinerja tersebut, realisasi anggaran di tahun 2025 sebesar 643,18 juta rupiah atau 90,37 persen dari alokasi anggaran sebesar 711,68 juta rupiah (sesudah *self-blocking*). Berdasarkan gambaran tersebut, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata mampu melakukan efisiensi anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 1,20% (sesudah *self-blocking*).



4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan dalam rangka memberikan layanan yang prima dalam mendukung visi dan misi Badan Pusat Statistik. Adapun beberapa rencana perbaikan ke depan untuk capaian kinerja yang lebih baik antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan K/L guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan data dengan statistik yang dihasilkan.
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan teknis maupun nonteknis yang relevan dengan tuntutan organisasi, pelaksanaan kegiatan *sharing knowledge* secara berkelanjutan, serta pemberian kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan lanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pegawai dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan serta menghasilkan output statistik yang lebih optimal.
3. Peningkatan ketepatan waktu rilis data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata melalui upaya percepatan proses pengolahan data yang didukung pemeriksaan berjenjang dan penguatan pengendalian kualitas. Upaya ini diharapkan mampu memastikan data statistik yang dirilis setiap bulan memiliki tingkat akurasi, konsistensi, dan kredibilitas yang tinggi.
4. Penguatan pembinaan statistik sektoral kepada K/L mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata melalui koordinasi dan komunikasi yang lebih rutin dan terstruktur, penyusunan jadwal kegiatan yang disepakati bersama, serta penyediaan forum diskusi yang terbuka. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dengan produsen data, serta memperbaiki kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.



LAMPIRAN



Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PARIWISATA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harmawanti Marhaeni, M.Sc.
Jabatan : Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815199312 2 002

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama


Harmawanti Marhaeni, M.Sc.
NIP. 19701112199211 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PARIWISATA

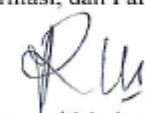
No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	74,41 Poin

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2908 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata	Rp.	3.952.881.000
	Jumlah	Rp.	3.952.881.000

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa


Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815199312 2 002

Palembang, 24 Januari 2025
Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata


Harmawanti Marhaeni, M.Sc.
NIP. 19701112199211 2 001



Lampiran 2 **Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

**SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA
TAHUN 2025**

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
	SLTA	Diploma	D-IV/S-1	S-2	S-3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	2	3	15	25	4	49



Lampiran 3

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025

**SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT GOLONGAN KEPANGKATAN
DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA
TAHUN 2025**

Unit Kerja	Gol II	Gol III				Gol IV				Total
	II/c	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	1	4	3	12	16	7	4	1	1	49



Lampiran 4 Jumlah Pegawai Fungsional BPS Tahun 2025

**SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT JENIS JABATAN
DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA
TAHUN 2025**

Unit Kerja	Struktural	Statistisi Utama	Statistisi Terampil		Statistisi Ahli			Pranata Komputer	Arsiparis Terampil	JFU	Total
			Statistisi Pelaksana Lanjutan	Statistisi Penyelia	Statistisi Pertama	Statistisi Muda	Statistisi Madya	Prakom Muda			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	1	1	1	2	8	24	7	1	1	3	49



Lampiran 5

Daftar Publikasi Berkualitas Tahun 2025

**PUBLIKASI/LAPORAN
DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI,
DAN PARIWISATA TAHUN 2025**

NO,	JUDUL PUBLIKASI / LAPORAN
(1)	(2)
1	Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2024 (20 Maret 2025)
2	Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2024 (27 Maret 2025)
3	Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 (29 Agustus 2025)
4	Indeks Pembangunan TIK 2024 (30 September 2025)
5	Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2024–2025 (22 Desember 2025)
6	Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024–2025 (31 Desember 2025)
7	Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2024–2025 (31 Desember 2025)
8	Statistik Keuangan BUMN & BUMD 2024 (22 Desember 2025)
9	Statistik Lembaga Keuangan 2024 (31 Desember 2025)
10	Statistik Hotel & Akomodasi Lainnya 2025 (31 Desember 2025)
11	Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2024 (24 Maret 2025)
12	Statistik Penyediaan Makanan Minuman 2024 (31 Desember 2025)
13	Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2024 (31 Desember 2025)
14	Statistik E-Commerce 2024 (28 November 2025)
15	Statistik Wisatawan Nusantara 2024 (27 Maret 2025)
16	Statistik Wisatawan Nasional 2024 (17 Maret 2025)
17	Laporan Statistik Perdagangan Internasional Jasa (Internal) (31 Mei 2025)
18	Kajian Penyusunan FATS 2022 (Internal) (31 Mei 2025)
19	BRS Perkembangan Pariwisata November 2024 (2 Januari 2025)
20	BRS Perkembangan Pariwisata Desember 2024 (3 Februari 2025)
21	BRS Perkembangan Pariwisata Januari 2025 (Batal Rilis di website) / Laporan Penyusunan BRS Perkembangan Pariwisata Januari 2025
22	BRS Perkembangan Pariwisata Januari dan Februari 2025 (8 April 2025)



NO,	JUDUL PUBLIKASI / LAPORAN
(1)	(2)
23	BRS Perkembangan Pariwisata Maret 2025 (2 Mei 2025)
24	BRS Perkembangan Pariwisata April 2025 (2 Juni 2025)
25	BRS Perkembangan Pariwisata Mei 2025 (1 Juli 2025)
26	BRS Perkembangan Pariwisata Juni 2025 (1 Agustus 2025)
27	BRS Perkembangan Pariwisata Juli 2025 (1 September 2025)
28	BRS Perkembangan Pariwisata Agustus 2025 (1 Oktober 2025)
29	BRS Perkembangan Pariwisata September 2025 (3 November 2025)
30	BRS Perkembangan Pariwisata Oktober 2025 (1 Desember 2025)



Lampiran 6 Hasil Evaluasi TPSS (SS)

Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Sesuai Standar

TPSS Tahun 2025*

Periode: -- Hilang Periode --

Show: semua

Kode Wilayah	Satker	Periode	Tahun	TPSS*	Utama	Tambahan	U1.1	U1.2	U1.2.1	U1.2.2	U1.3.1	U1.3.2	U2.1
0000	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Perikanan	Triwulan IV	2025	99.94	99.94	0	1	100	100	100	100	100	100
0000	Direktorat Perikanan	Triwulan III	2025	97.97	96.07	0	1	100	100	100	100	75	100



Lampiran 7

Surat Hasil Penilaian SAKIP

**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

Nomor : T-149/08100/PW.120/LHE/2025 Jakarta, 22 Desember 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi
dan Pariwisata Tahun 2025

Yth. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, Inspektorat Wilayah I telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menunjukkan nilai sebesar **"72.35"** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah **"Sangat Baik"**.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara beserta seluruh jajaran, atas kerjasama dan kesungguhan dalam memenuhi dokumen pendukung kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP. Semoga Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata dapat lebih meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerjanya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result-oriented government*) dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt Inspektur Wilayah I,



Eko Yuwono

Tembusan:

1. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
2. Inspektur Utama



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



Lampiran 8

Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja TA 2025

**ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI,
DAN PARIWISATA TAHUN 2025**

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)
Sasaran Strategis 1 Terwujudnya peningkatan pemanfaatan data statistik berkualitas dan <i>insight</i> dalam perumusan dan kebijakan dan pengambilan keputusan							
1.3.5.1 Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	678.178.000	633.065.011	93,35
Sasaran Strategis 2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang baik dan terpadu							
2.3.3.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	Poin	74,41	86,36	116,06	33.500.000	10.110.000	30,12
Total				108,03	711.678.000	643.175.011	90,37

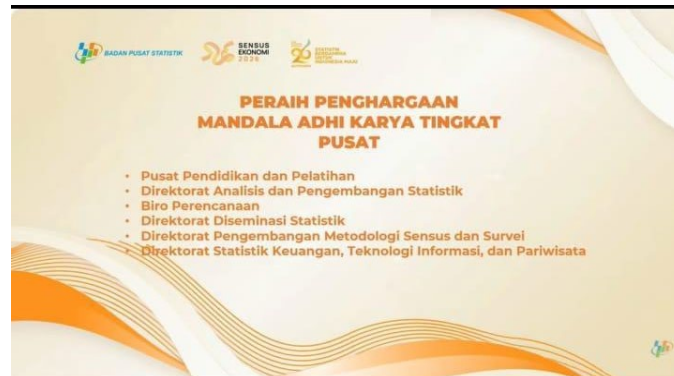


Lampiran 9

Prestasi dan Inovasi

Penghargaan 1

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata meraih penghargaan Mandala Adhi Karya Tingkat Pusat



Penghargaan 2

Insan Statistik Teladan (IST) Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata terpilih mewakili Kedeputan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa



Penghargaan 3

Penghargaan Top 3 Inovasi Pelayanan Publik atas inovasi *Mobile Positioning Data (MPD)*: Transformasi Pengumpulan Data Wisatawan Nusantara dalam Era Digital



Penghargaan 4

Penghargaan BERKUALITAS pada Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) domain Kualitas Data dan Aspek Pemanfaatan Data Tahun 2025

Lampiran II Surat Plt. Sekretaris Utama

Nomor : B-600/02000/PR.613/2025

Tanggal : 3 Oktober 2025

Hasil Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025

No	Kode	Nama Unit Kerja	Domain Kualitas Data	Aspek Pemanfaatan Data Statistik	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4100	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	4.20	3.67	Berkualitas
2	4200	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	4.67	4.33	Berkualitas
3	4300	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	3.64	4.33	Berkualitas
4	5100	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4.48	3.67	Berkualitas
5	5200	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	4.07	4.00	Berkualitas
6	5300	Direktorat Statistik Industri	4.55	3.67	Berkualitas
7	6100	Direktorat Statistik Distribusi	3.70	4.00	Berkualitas
8	6200	Direktorat Statistik Harga	4.00	3.67	Berkualitas
9	6300	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	3.42	3.67	Berkualitas
10	7100	Direktorat Neraca Produksi	3.21	3.67	Berkualitas
11	7200	Direktorat Neraca Pengeluaran	4.17	4.00	Berkualitas
12	7300	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	3.50	3.67	Berkualitas


Sumber: Surat B-600/02000/PR.613/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Penyampaian Hasil PSB Tahun 2025



Penghargaan 5

Undangan dalam berbagai Acara Internasional:

- a. Introduction of Mobile Positioning Data (MPD) for Official Statistics diselenggarakan oleh Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific, tanggal 8 Juli 2025 di Jakarta, Indonesia



POLITEKNIK STATISTIKA STIS
 Jalan Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330
 Telp. (021) 6508812, 8191437
 Website: www.stis.ac.id, email: info@stis.ac.id

Nomor : B-261/02700/HM.310/2025 Jakarta, 23 Juni 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) set
 Hal : Permohonan Narasumber, Pengajar, dan Moderator

Yth. Ibu Hamawanti Marhaeni, M.Sc.
 Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
 di
 Tempat

Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific bekerja sama dengan Indonesia Aid akan menyelenggarakan kegiatan Knowledge Development for Policy Makers dengan topik: *"Introduction of Mobile Positioning Data (MPD) for Official Statistics"*, yang akan dilaksanakan pada 8–10 Juli 2025 di Jakarta, Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pertukaran pengetahuan serta penguatan kapasitas terkait pemanfaatan MPD dalam penyusunan statistik resmi. Acara ini akan dihadiri oleh perwakilan dari lembaga statistik nasional (NSO), kementerian terkait, serta institusi lainnya dari beberapa negara, baik pada level manajerial maupun teknis.


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Ibu untuk menjadi pembicara dalam sesi panel berjudul: *"Opportunity of Big Data and Data Science for Official Statistics"*, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
 Waktu : 09.30 – 12.00 WIB
 Tempat : Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta, Indonesia

Selain itu, kami juga memohon kesediaan Ibu untuk:

1. Menunjuk 2 (dua) orang staf Direktorat Statistik Kesejahteraan dan Ketimpangan (KTIP) sebagai pengajar dalam kegiatan *Knowledge Development for Analysts: Short Course on MPD Processing and Analytics for Official Statistics*, yang rencananya akan diselenggarakan pada 15–24 September 2025 di Bali (jadwal tentatif);
2. Menunjuk 1 (satu) orang staf dari tim teknis MPD sebagai moderator pada sesi panel berjudul: *"The Administration and Budgeting in the Process of MPD Acquisition"*, yang akan dilaksanakan pada:

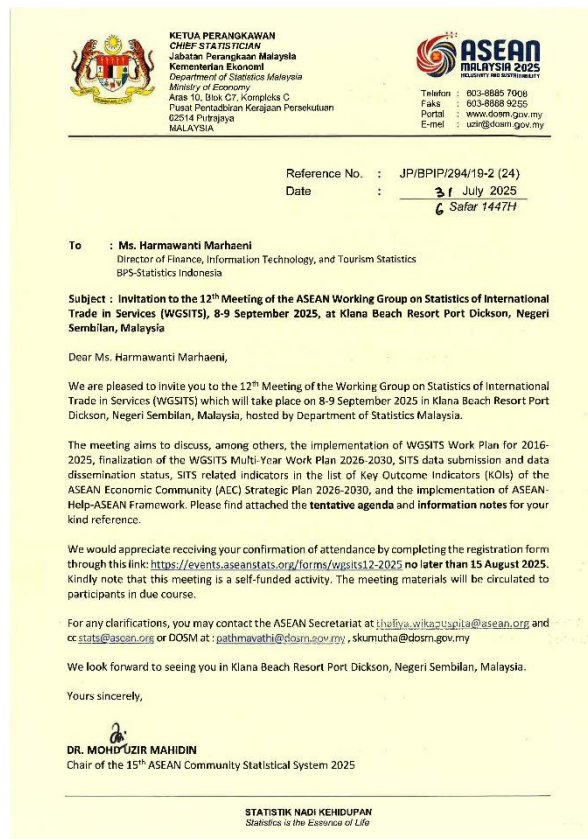
Hari, Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025
 Waktu : 13.30 – 16.30 WIB
 Tempat : Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta, Indonesia



* Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file asli



- b. ASEAN Working Group on Statistics of International Trade in Services (WGSITS), tanggal 8-9 September 2025 di Negeri Sembilan, Malaysia



- c. The 13th International Monetary Fund Statistical Forum on Measuring Cross-Border Economic and Financial Linkages in a Dynamic World, tanggal 19-20 November 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat





- d. Task Group on Measuring Value (TG-eCOM) dan Working Group on Measuring E-Commerce and the Digital Economy, 6th meeting, tanggal 2-3 Desember 2025 di Jenewa, Swiss.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA
— *Enlighten The Nation* —



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS - Statistics Indonesia

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpsdq@bps.go.id